

No. Reg: 191160000024242

LAPORAN PENELITIAN



**KURIKULUM KKNI, DAN POLA PENGEMBANGANNYA PADA
PROGRAM S1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI INDONESIA
(Penelitian Pada Program Studi S1 Bahasa Arab yang berakreditasi unggul)**

Diajukan oleh:

Ismail Muhammad

NIDN: 2011046701

Safrina Ariani

NIDN: 2023027101

KATEGORI PENELITIAN	PDI
BIDANG ILMU KAJIAN	TARBIYAH DAN ILMU PENDIDIKAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Kurikulum KKNI, dan Pola Pengembangannya Pada Program S1 Pendidikan Bahasa Arab Di Indonesia (Penelitian Pada Program Studi S1 Bahasa Arab Yang Berakreditasi Unggul)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)
- c. No. Registrasi : 191160000024242
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Pendidikan

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ismail Muhammad, MAg
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 196704111996031001
 - d. NIDN : 2011046701
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201104670108001
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Bahasa Arab

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dra. Safrina Ariani, MA
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/PAI

3. Lokasi Penelitian : Banda Aceh, Jakarta dan Malang
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 25 Oktober 2019
Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Dr. Ismail Muhammad, MAg
NIDN. 2011046701

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur hanya kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada tim peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, Shabat dan pengikutnya.

Penelitian ini berjudul **Kurikulum KKNI, dan Pola Pengembangannya pada Program S1 Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia (Penelitian Pada Program Studi S1 Bahasa Arab yang berakreditasi unggul)**. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Pola pengembangan kurikulum Prodi Bahasa Bahasa Arab berdasarkan kurikulum KKNI di beberapa prodi Bahasa Arab Unggul di Indonesia.

Dengan selesainya penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.
3. Kepala Pusat Penelitian dan jajarannya.
4. Ketua PS PBA UIN Ar-Raniry dan jajarannya.
5. Ketua PS PBA UIN Syarif Hidayatullah dan jajarannya.
6. Ketua PS PBA UIN Maulana Malik Ibrahim dan jajarannya.
7. Ketua PS PBA Universitas Negeri Jakarta dan jajarannya.
8. Ketua PS PBA Universitas Negeri Malang dan jajarannya.
9. Pembimbing Reviuwer dan
10. Segenap pihak yang telah membantu pelaksanaan serta menyampaikan saran dan kritikan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Untuk penyempurnaan penelitian ini, tim peneliti mengharap kritikan, masukan dan saran yang konstruktif. Semoga penelitian ini bermanfaat, bagi pembaca, serta dapat diterima dengan layak secara akademis-keilmuan.

Banda Aceh, 23 Oktober 2019

Tim Peneliti

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismail Muhammad
NIP : 19670411199603001
Tempat/ Tanggal lahir : Geurugok/11 April 1967
Alamat : Perumahan UIN No. 49, Desa Cot Yang,
Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul : Kurikulum KKNI, Dan Pola Pengembangannya Pada Program S1 Pendidikan Bahasa Arab Di Indonesia (Penelitian Pada Program Studi S1 Bahasa Arab Yang Berakreditasi Unggul), adalah benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dapat berupa hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep hasil rancang bangun, model, dan/atau perumusan rekomendasi, kecuali lampiran yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Peneliti,

Ismail Muhammad
NIP: 19670411199603001

**KURIKULUM KKNI, DAN POLA PENGEMBANGANNYA PADA PROGRAM
S1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI INDONESIA
(Penelitian Pada Program Studi S1 Bahasa Arab yang berakreditasi unggul)**

Ketua Peneliti :
Ismail Muhammad

Anggota Peneliti :
Safrina Ariani

Abstrak

Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah tentang pola pengembangan kurikulum KKNI, problematika yang dihadapi dan bagaimana format dan struktur kurikulum yang disusun oleh PS PBA yang berakreditasi unggul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : (1). Aturan pengembangan kurikulum KKNI telah menetapkan tahapan-tahapan penyusunan kurikulum, yaitu (a). Penetapan Profil Lulusan. (b). Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (c). Penetapan Bahan Kajian. (d). Penentuan Mata Kuliah. (e). Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah. (f). Penyusunan Struktur Kurikulum. (g). Proses Pembelajaran. (h). Penilaian, dan (i). Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester. Secara umum PS PBA yang menjadi subjek penelitian ini mengembangkan kurikulum dengan dengan mengikuti langkah-langkah tersebut. Namun demikian dalam penetapan MK tidak dilakukan secara mendalam dengan mengembangkan CPL dan BK secara bebas, tetapi lebih kepada menggunakan CPL yang sudah ada dalam (Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014, serta menyesuaikan CPL dan BK tersebut dengan MK yang sudah ada. Pengembangan CPL yang mandiri hanya dilakukan terhadap MK peminatan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal PS tersebut. (2). Kendala yang dihadapi PS PBA dalam pengembangan kurikulum KKNI, yaitu : *pertama*, karena masih bersifat baru, konsep ini belum diketahui secara mendalam oleh dosen dan pengelola PS PBA, sehingga perlu diadakan workshop kurikulum KKNI. *Kedua*, Pembahasan CPL seharusnya melibatkan seluruh dosen yang mengampu MK pada PS, karena hanya merekalah yang mengerti tentang kedalaman dan keluasan Bahan Kajian yang dibutuhkan untuk penembangan MK, namun rapat pembahasan CPL terkendala karena dengan banyaknya kesibukan, sebagian besar dosen tidak memenuhi undangan, sehingga pengembangan CPL secara mandiri sulit dilakukan. *Ketiga*, perumusan kurikulum KKNI membutuhkan banyak tahapan dan menghabiskan banyak waktu dan energi. Sehubungan dengan itu pihak penyusun harus memiliki banyak kesempatan untuk menyelesaikan pembahasan kurikulum. Selain itu untuk membahas kurikulum tersebut juga berkenaan dengan banyak aturan tentang kurikulum KKNI, seperti Keppres, SNPT dan aturan lainnya. *Keempat*, dalam pengembangan peminatan, PS PBA terkendala dengan kurangnya sumber daya manusia di PS, sehingga sulit untuk mengembangkan peminatan seperti yang dibutuhkan. (3). Struktur kurikulum yang dikembangkan PS PBA unggul adalah struktur kurikulum model serial, di mana MK menurut model ini, penyusunan mata kuliah dilakukan dari yang paling dasar sampai di semester akhir.

Kata Kunci: Kurikulum KKNI, PS PBA, dan CPL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB SATU: PENDAHULUAN

I.	Latar Belakang Masalah	8
II.	Rumusan Masalah	11
III.	Tujuan Penelitian	12

BAB DUA: KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI

I.	Kajian (Penelitian) Terdahulu	13
II.	Tinjauan Teori	16
	A. Makna Kurikulum	17
	B. Kurikulum KKNI Dan Aplikasinya Di Perguruan Tinggi	19
	C. Pola Aplikasi Kurikulum KKNI	28

BAB TIGA: METODOLOGI PENELITIAN

I.	Metode Penelitian	45
II.	Sumber Data	46
III.	Instrumen Penelitian	47

BAB EMPAT: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I.	Identifikasi Lapangan Penelitian	49
II.	Standar Kurikulum PBA yang dikembangkan IMLA (Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-Arabiyah) Untuk PBA dan PBSA di Indonesia	57
III.	Pola pengembangan Kurikulum Pada Pada Prodi PBA Unggulan	64
IV.	Problematikan Yang Dihadapi PS PBA Unggul dalam Pembahasan Kurikulum KKNI	74
V.	Format dan Struktur Kurikulum KKNI	76

BAB LIMA: PENUTUP

78

DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI

81

Daftar Riwayat Hidup Peneliti

95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	83
Lampiran 2	86
Lampiran 3	89
Lampiran 4	92

DAFTAR TABEL

Tabel I: Profil Lulusan PBA	31
Tabel II: Contoh Pola Pengembangan BK	33
Tabel III: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	58
Tabel IV: Sikap dan Tata Nilai	59
Tabel V: Keterampilan Umum	60
Tabel VI: Keterampilan Khusus	61
Tabel VII: Penguasaan Pengetahuan	62
Tabel VIII: Kelompok MK PBA UM	71
Tabel IX: Struktur MK Paket Peminatan PBA UM	72
Tabel X: Struktur Kurikulum IMLA	77

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Dan Pendidikan Tinggi, Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Dalam hal ini Kurikulum, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam operasi pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga menjadi petunjuk bagi pihak eksternal untuk mengetahui inti pembelajaran yang dapat diamati melalui uraian yang terdapat dalam komponen-komponen kurikulum, yang mencakup komponen kompetensi yang ingin dicapai, perencanaan materi, penggunaan metode/media belajar dan sistem evaluasi (Oemar Hamalik: 2005, 24).

Pada sekolah dasar dan menengah, dasar kurikulum dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan untuk madrasah (MI, MTs dan MA) dasar kurikulum dikembangkan oleh Kementerian Agama. Secara umum, inti dari kurikulum kedua model pendidikan (sekolah dan madrasah) tersebut disusun secara sentralistik, dan dikembangkan untuk disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional Republik Indonesia.

Adapun kurikulum pada perguruan tinggi, disusun dengan merujuk pada aturan-aturan tertentu yang menjadi pijakan dasar operasionalnya. Aturan dasar kurikulum ini adalah Undang-undang RI No. 12 tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi, yang memuat sejumlah aspek dasar pengembangan pendidikan tinggi. Dari keseluruhan isi undang-undang tersebut dikutip tiga aspek yang mempunyai korelasi secara langsung dengan proposal ini, yaitu tentang:

1. Tujuan Pendidikan Tinggi. Dalam Undang-undang RI, nomor 12 tahun 2012, Bab I, pasal 5 disebutkan bahwa Tujuan Pendidikan Tinggi adalah: (a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan

daya saing bangsa; (c) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Program Studi. Dalam Undang-undang RI, nomor 12 tahun 2012, Bab I, pasal 1 disebutkan bahwa; Program Studi adalah suatu kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Kurikulum. Dalam Undang-Undang RI, nomor 12 tahun 2012, pasal 35, ayat 2 menjelaskan bahwa; Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selain itu dalam pasal ini juga disebutkan bahwa: Kurikulum dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Selain itu pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden RI, no. 8 tahun 2012, tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), yang di dalamnya menjelaskan tentang kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Dalam sambutan Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang terdapat dalam *Panduan Pengembangan Kurikulum PT* diuraikan bahwa: Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki

'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Selain mengikuti seluruh aturan yang sudah ada, perguruan juga dibolehkan mengembangkan aturan-aturan lokal untuk menyesuaikan dengan situasi perguruan tinggi itu sendiri. Dengan demikian, maka kurikulum perguruan tinggi berkembang lebih khas, dan diberi kesempatan kepada setiap program studi untuk merancanginya secara otonom, mengikuti kebutuhan dan ciri-ciri lokasi perguruan tinggi itu berada, dan tidak bertentangan dengan tujuan dasar perguruan tinggi di Indonesia.

Pemberian kesempatan kepada perguruan tinggi (Program Studi) untuk menyusun kurikulum menjadi suatu persoalan tersendiri, karena perlu melibatkan banyak pihak, agar dapat menghasilkan kurikulum yang sempurna, sesuai dengan aturan KKNI dan aturan lainnya.

Salah satu aspek penting yang diutamakan dalam penilaian akreditasi program studi di perguruan tinggi oleh BAN-PT, adalah aspek kurikulum dan pembelajaran yang merupakan bagian dari standar V. Berdasarkan pengalaman pribadi sebagai asesor Ban-PT, dari 27 Program Studi (PS) yang diamati, hanya terdapat 5 PS yang pengembangan kurikulumnya telah mengikuti standar KKNI secara baik, selain dari lima PS tersebut, pengembangan KKNI pada PS PBA masih membutuhkan penyempurnaan.

Selain itu, suatu perguruan tinggi wajib mengembangkan program studi unggulan yang menjadi daya tarik khususnya, dibandingkan dengan program studi yang sama dari perguruan tinggi lain. Pemberian hak otonom kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum menjadi tantangan tersendiri bagi suatu perguruan tinggi, karena rancangan kurikulum dimulai dengan memperhatikan arah pembelajaran yang tertuang dalam Visi dan Misi yang juga digagas secara khas dan otonom.

Visi dan Misi suatu perguruan tinggi memperlihatkan orientasi dan jangkauan kompetensi yang diinginkan oleh pengelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang bercita-cita global, tentu menggagas Visi dan Misi yang berjangkauan global, dan merancang kurikulum untuk tatanan global. Perguruan tinggi kelas lokal tentu menggagas Visi dan Misi setingkat lokal, disesuaikan juga dengan kualitas kepemimpinan dan dosen yang tersedia (Lorin W. Anderseon and David R. Krathwohl, 2010, hal. 3).

Adapun kelemahan yang menjadi temuan awal kekurangan dari pengembangan kurikulum program studi Bahasa Arab adalah: (a) Pengelola Program Studi Pendidikan Bahasa Arab belum mampu menentukan jumlah sks yang dapat mengarahkan pembelajaran untuk mencapai visi dan misi yang mereka gagas, dan bahkan terdapat beberapa program studi yang visi dan misinya tidak dapat dijelaskan secara baik. (b) Pengelola Program Studi Pendidikan Bahasa Arab belum mampu memasukkan aspek-aspek masa depan dalam pengembangan kurikulum, sehingga banyak kurikulum yang masih berorientasi masa kini, atau bahkan masa lalu, sehingga kurikulum menjadi stagnan dan kaku. (c) Pengelola Program Studi Pendidikan Bahasa Arab belum menentukan jumlah Mata Kuliah (MK) dan jumlah sks MK pilihan, dan bahkan ditemukan beberapa P S yang tidak mempunyai sks MK pilihan. Padahal MK dan sks MK pilihan merupakan bagian yang wajib ada dalam kurikulum PS untuk memperjelas distingsi program studi tersebut. (d) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab belum mampu mengembangkan distingsi program studi sebagai penciri dari suatu program studi.

Dari wawancara yang dilakukan dalam visitasi akreditasi, dijumpai banyak pengelola program studi yang belum mampu mengembangkan kurikulum secara baik, karena mereka belum memahami aspek kurikulum KKNI secara sempurna dan tidak dapat menemukan contoh ideal dari kurikulum KKNI yang telah ada. Di antara mereka, terdapat beberapa program studi yang telah melakukan studi banding kepada perguruan tinggi besar, namun mereka juga belum dapat/mampu mengembangkan untuk kurikulum program studi sendiri secara lebih spesifik.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk mengadakan penelitian pada beberapa program studi Bahasa Arab, yang berakreditasi A (unggul) di Indonesia, yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, PBA UIN Syarif Hidayatullah – Jakarta, PBA UIN Maulana Malik Ibrahim – Malang, PBA Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan PBA Universitas Negeri Malang (UM). Selain itu penelitian ini akan menelaah aturan-aturan kurikulum KKNI, agar dapat menemukan suatu pola dan sistem yang praktis yang memudahkan pengelola program studi Bahasa Arab dalam mengembangkan kurikulum KKNI secara sempurna.

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pengembangan kurikulum KKNI menurut aturan pengembangan kurikulum di Indonesia?
2. Bagaimana pola pengembangan kurikulum yang dilakukan PS PBA S1 yang berakreditasi unggul di Indonesia?
3. Apa problematika yang dihadapi PS PBA yang berakreditasi unggul dalam pengembangan Kurikulum KKNI?
4. Bagaimana format dan struktur kurikulum yang disusun oleh PS PBA yang berakreditasi unggul?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pola pengembangan kurikulum KKNI menurut aturan pengembangan kurikulum di Indonesia.
2. Mendeskripsikan pola pengembangan kurikulum yang dilakukan PS PBA S1 yang berakreditasi unggul di Indonesia.
3. Mengungkap problematika yang dihadapi PS PBA yang berakreditasi unggul dalam pengembangan Kurikulum KKNI.
4. Menemukan format dan struktur kurikulum KKNI yang disusun oleh PS PBA yang berakreditasi unggul.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI

I. Kajian (Penelitian) Terdahulu.

Munculnya kurikulum KKNI yang diberlakukan di perguruan tinggi di Indonesia menimbulkan berbagai pemikiran, baik yang berbentuk kajian tulisan yang berusaha menguraikan dan menemukan pola penerapan kurikulum KKNI di perguruan tinggi, maupun usaha-usaha untuk mengevaluasi dan mengkaji *responsibiliti* dari *stackholder* terhadap kurikulum.

Dalam usaha untuk menelaah kajian dan hasil penelitian tentang kurikulum dan pengembangannya pada perguruan tinggi, peneliti menemukan beberapa hasil karya peneliti terdahulu yang akan diuraikan dalam bahagian berikut ini.

Anna Zakiiyah Derajat dalam artikelnya yang berjudul “Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi”, mengutarakan beberapa hal penting yaitu: (1) Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sistem yang dianut oleh setiap Perguruan Tinggi haruslah berangsur diubah. Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tersebut, perubahan kurikulum ini menjadi upaya untuk pengembangan dan inovasi terhadap tuntutan tersebut. (2) Kurikulum harus mampu mengantarkan mahasiswa untuk mempunyai kompetensi dalam bidang *attitute*, *skill*, pengetahuan, manajerial dan tanggung jawab. Selain itu Anna Zakiiyah mengutarakan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum KKNI, yaitu: (1) Learning Outcomes, (2) Jumlah sks, (3) Jumlah Mata kuliah wajib, (4) Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, (5) Akuntabilitas Asesmen, (6) Waktu studi minimum dan (7) Perlunya Diploma Suplemen. Hal lain yang menjadi catatan penting dari Anna Zakiiyah adalah tidak semua Perguruan Tinggi berhasil menerapkan kurikulum ini, dan kemudian menjadikannya sebagai acuan keberhasilan yang akan dicapai sebagai profil lulusan.

Syarifuddin dkk. melakukan penelitian yang diberi judul “Model Penerapan Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Penguatan Mutu Program Studi Pariwisata dan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka mencari model penerapan Kurikulum KKNI pada program studi Pendidikan bahasa

Inggris, dan Program Studi Pariwisata di Universitas Gorontalo. Kesimpulan penting dari penelitian Syarifuddin dkk. ini adalah:

(1) Ancangan Model Penerapan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) diperkuat dengan ancangan implementasi manajemen program studi berbasis akreditasi dan dirumuskan dalam suatu sistem pengelolaan prodi yang utuh, komprehensif, sistematis, dan terukur, serta dilandasi dengan evaluasi diri dan rencana strategis pengembangan Program Studi yang berkualitas dan berdaya saing.

(2) Dalam interaksi kurikulum KKNI memberi semangat dan menginspirasi *civitas academica* program studi yang diteliti dalam mengembangkan kualitas akademik, termasuk komitmen Pimpinan Fakultas dalam mendorong dan mendukung implementasi penerapan Kurikulum berbasis KKNI yang sekaligus mengintegrasikan pengelolaan program studi berbasis akreditasi pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Pariwisata (Syarifuddin, 2013, hal. 87).

Penelitian tentang KKNI juga dilakukan oleh Ali Akbar Jono, Dosen IAIN Bengkulu, yang diberi judul "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu". Dalam laporan penelitian yang disajikan dalam Jurnal Manhaj, Vol. 4, Nomor 1, Januari - April 2016, Ali Akbar Jono menyimpulkan: Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kelima LPTK yang menyelenggarakan program studi pendidikan bahasa Inggris pada prinsipnya siap melakukan perberlakuan kurikulum berbasis KKNI pada tahun akademik 2016/2017, akan tetapi efektifitas penerapan kebijakan ini seyogya dibarengi dengan kesiapan semua perangkat yang dibutuhkan termasuk kebijakan pengembangan kurikulum tertulis dari masing-masing institusi secara permanen. Dari lima LPTK yang ada, hanya FKIB-Unib (Universitas Bengkulu) yang telah menerapkan kurikulum KKNI dan berjalan baik sedangkan yang lain masih dalam proses finalisasi struktur kurikulum yang diharapkan (Ali Akbar Jono, 2016, hal 58).

Hendri Purbo Waseso dan Muhtar Sofyan Hidayat mengadakan penelitian di Universitas Studi Ilmu al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah dengan judul "Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi PGMI UNSIQ Jawa Tengah". Kesimpulan yang diperoleh dari penelitiannya adalah: bahwa persiapan dalam penerapan kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI yaitu: (1) Dokumen kurikulumnya baru sampai pada

tahap penentuan bahan kajian, penyiapan sumber daya manusianya (dosen) telah dilakukan konsorsium dosen PGMI UNSIQ, dan sarana/prasarana telah disiapkan secara baik. (2). Penerapan kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI yaitu Perencanaan yang dilakukan dosen belum sepenuhnya mengacu pada kurikulum berbasis KKNI.

Penelitian lain, tentang Kurikulum KKNI juga dilakukan oleh Moh Masnun dkk. Yang berjudul “Respon *Stakeholders* Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Jurusan PGMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon”. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini bertitik fokus pada Respon *stakeholder* Terhadap Kurikulum. Dari penelitiannya Moh Masnun dkk menyimpulkan bahwa, secara umum respon *stakeholders* (dosen jurusan PGMI, Kepala MI Kota Cirebon, dan Kepala seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Cirebon) terhadap kurikulum berbasis KKNI jurusan PGMI sudah baik dan sangat layak diimplementasikan di jurusan PGMI.

Penelitian yang juga menarik tentang kurikulum KKNI dilakukan oleh Casmini yang berjudul “Evaluasi Dan Peninjauan Kurikulum Bki Berbasis KKNI”. Tulisan ini kemudian dimuat dalam jurnal *Jurnal Hisbah*, Vol. 11, No. 1, pada Juni 2014. Salah satu hal penting dari tulisan Casmini adalah (1). Peninjauan kembali sistem evaluasi dalam konteks implementasi kurikulum yang berlaku pada program studi atau jurusan BKI sangat perlu dilakukan, karena evaluasi merupakan salah satu komponen pokok kurikulum. Jika prodi/jurusan melakukan pengembangan, maka semestinya peninjauan kembali terhadap evaluasi dilakukan sesuai dengan karakteristik model kurikulum yang berlaku. (2). Kurikulum yang telah ada perlu dievaluasi dalam garis besar rencana pembelajaran yang diimplentasikan dalam proses pembelajaran serta menghasilkan pembelajaran (Casmini : 2014, 125).

Dari sejumlah hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa Kurikulum KKNI merupakan kurikulum yang baik, yang jika dikembangkan dan diterapkan secara benar akan mampu membawa peserta didik untuk mempunyai kemampuan yang baik. Selain itu, kurikulum KKNI mendapat respon yang baik dari *stakeholder* perguruan tinggi, namun dalam penerapannya perlu dievaluasi, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Aspek penting yang perlu juga mendapat perhatian adalah belum adanya kesiapan perangkat penerapan kurikulum KKNI dan masih terdapat program studi yang belum sepenuhnya menerapkan kurikulum

dengan mengacu KKNi secara maksimal. Dari penelitian yang diuraikan di atas juga dapat diamati belum ditemukan suatu penelitian yang berusaha menemukan suatu model kurikulum KKNi yang dapat dipahami dan dikembangkan secara mudah, terutama dalam pembelajaran pada program studi Bahasa Arab.

II. Tinjauan Teori

A. Makna Kurikulum

Dalam beberapa komunikasi dengan guru dan pelaku pendidikan ketika penulis menjadi nara sumber alam pendidikan dan pelatihan, ditemukan banyak guru yang belum memahami makna dari konsep kurikulum secara maksimal, walaupun mereka telah terlibat secara mendalam dan telah menjadi praktisi pendidikan dalam rentang waktu yang panjang. Konsep teori dari penelitian ini dimulai dengan menguraikan tentang makna kurikulum, agar kita mempunyai pemahaman yang sama terhadap kurikulum.

Istilah kurikulum semula berasal dari bahasa Latin yaitu "*Curriculae*", yang secara etimologis berarti jarak tempuh dalam berlari, atau jarak dari garis start sampai garis finish (Hamalik: 2005, 16). Dalam bahasa Arab kurikulum disebut dengan istilah *al-manhaj* (المنهج), yang menurut kamus *Lisān al-Arab* bermakna *al-tharīq al-wādhih* (الطريق الواضح) atau jalan terang (Mandhūr: 2003, hal. 714).

Secara terminologis, dengan makna yang sangat mendasar dan klasik, kurikulum dipahami dengan beragam pengertian. Dalam *Oxford English Dictionary* (OED) disebutkan, kurikulum adalah: "*A course; . . . a regular course of study or training, as a school or university*" (Oxford: 1978, 1271). Makna yang tidak jauh berbeda juga diuraikan dalam *Webster's New International Dictionary*, yaitu "*The whole body of course offered by an education institution or one of its branches*" (Gove: 1966, 557). Kedua kamus ini memberi makna kurikulum dengan menganggapnya sebagai "mata pelajaran yang disajikan secara reguler pada institusi pendidikan atau pelatihan seperti yang disajikan oleh sekolah atau universitas". Pemahaman yang hampir sama juga ditulis oleh Yahya Handāmi dan Jābir Abdul Hamīd Jābir dalam buku *Al-Manhaj, Asāsuhā, Takhtituhā, Taqwīmuhā*, yang juga menyebutkan bahwa, secara konvensional yang dimaksud dengan kata *manhaj* (Kurikulum) adalah, sejumlah materi pembelajaran yang dipelajari siswa, yang akan diuji pada akhir tahun pembelajaran (Handami: 1987, 9).

Pemahaman demikian menurut Philip W. Jackson telah dipakai sejak tahun 1633 M. Catatan tentang ini diperoleh dari University of Glasgow kemudian ditransfer

ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1824 M. seperti yang disebutkan oleh J. Russel yang menulis “. . . *when the German student has finished his curriculum . . .*” Selanjutnya Jackson mengatakan: “. . . *that by the middle of the 19th century the common use of the word as meaning simply a course of study was more or less established and was routinely applied not just to the subjects studied in colleges and universities but to precollegiate levels of schooling as well*” (Jackson:1992, 5).

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara historis, yang dimaksud dengan kurikulum, sejak tahun 1633 M sampai akhir abad XIX dipahami sebagai “sejumlah materi ajar yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan”. Dalam hal ini, materi ajar yang dipilih adalah materi yang menurut pengelola pendidikan terbukti telah memberikan manfaat bagi masa depan anak didik dan masyarakat. Urutan materi tersebut kemudian dipilih dan disusun secara sistematis dan logis.

Persoalan muncul ketika semakin lama perjalanan kehidupan, maka semakin banyak materi ajar yang memberi manfaat kepada masyarakat (Hamalik: 2005, 18). Akibatnya jumlah materi ajar menjadi bertambah. Maka terjadilah tarik menarik antar berbagai pihak untuk untuk mengisi kurikulum sesuai dengan kepentingan dan penilaian masing-masing.

Pada negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas dengan rakyat yang majmuk, seperti Negara Indonesia, tarik menarik terhadap isi kurikulum semakin kuat, dengan beragam kepentingan. Untuk itu, demi menjaga agar materi pembelajaran pada semua sekolah berada dalam tataran dan kualitas yang sama, maka pemerintah, dengan bantuan para ahli pendidikan menyusun kurikulum secara sentral, yang seringkali tanpa melibatkan pelaku di lapangan dan tanpa menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat pada suatu daerah. Cara ini dapat menjadikan kurikulum bersifat sentralistik, karena penyusunannya mengabaikan situasi lokasi tempat pembelajaran berlangsung yang mempunyai kepentingan terhadap materi tertentu, mengingkari ciri khas suatu masyarakat, mengabaikan perbedaan individu siswa, dalam daya serap pengetahuan dan tidak memperhitungkan fasilitas/sarana tempat pendidikan berlangsung.

Para ahli pendidikan, diantaranya Al-Syaibany dan Philip W. Jackson, menganggap kalau kurikulum hanya berisi materi pembelajaran semata, maka kurikulum menjadi sangat sempit (Jackson:1992, 5). Karena pendidikan seharusnya

tidak kaku dengan mengikuti materi ajar yang telah disusun dalam kurikulum saja, tetapi bersifat fleksibel dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Al-Syaibani secara tegas menyebutkan, pemahaman kurikulum sebagai materi pembelajaran mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Secara ringkas, pendapat al-Syaibani adalah : a. Pemahaman yang sempit, karena tidak memasukkan pengalaman dan aktivitas siswa yang berada di bawah pengelolaan sekolah, untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai. b. Pusat perhatian hanya diarahkan pada materi ajar, pengetahuan bersifat teoritis dan hafalan, serta melupakan aspek ketrampilan dan kecakapan dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari teori yang dipelajari. c. Dalam kajian terhadap materi yang diberikan, para siswa dipersiapkan dengan berdasarkan pengalaman masa lalu dan melupakan persoalan-persoalan kekinian. d. Menganggap semua siswa sama dan mengabaikan keadaan *individual differences* siswa yang meliputi, bakat, minat dan kebutuhannya, karena siswa dipaksa harus menyesuaikan diri dengan kurikulum, sehingga siswa bersikap pasif, aktifitasnya terbatas hanya menerima pengetahuan dan tidak diberi kesempatan untuk berkreasi secara positif. e. Memecah-mecah pengetahuan dalam berbagai ilmu yang tidak berkaitan (al-Syaibani: 1979, 481).

Dengan pandangan negatif yang disebutkan di atas dan pengaruh dari perkembangan masa dan perubahan masyarakat, maka banyak kalangan mulai menggugat makna kurikulum seperti ini, dan menghendaki adanya perubahan pemahaman kurikulum ke pemahaman baru yang lebih kompleks, dengan cakupan yang lebih luas.

Philip W. Jackson menulis, John Dewey (1902) melihat kurikulum tidak hanya merupakan materi pembelajaran. Sebagai contoh, ketika seorang anak bermain dengan melempar sesuatu, jauhnya lemparan tersebut dipahami sebagai pengetahuan dan pembelajaran tentang geometri dan fisika. Dari contoh ini dipahami bahwa belajar di sekolah tidak hanya dengan mengikuti materi di dalam kelas, tetapi dapat diperoleh dengan bermain dan segala pengalaman yang diperolehnya di bawah bimbingan sekolah (Jackson:1992, 5). Pemikiran Dewey tidak secara langsung menunjukkan adanya pemahaman baru terhadap kurikulum, tetapi dengan contoh yang disebutkan itu, telah mengarahkan kurikulum kepada pemikiran baru, dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup materi pembelajaran yang disajikan secara reguler.

Berdasarkan pemikiran Dewey tersebut, kemudian pemahaman yang paling umum diterima tentang kurikulum telah berubah dari *content* (isi) suatu mata pelajaran, urutan pokok pembahasan dan materi, menjadi semua pengalaman yang ditawarkan/disediakan untuk para siswa di bawah bantuan ataupun bimbingan sekolah. Pendapat tersebut disampaikan oleh Ronald C. Doll dalam menjelaskan tentang perubahan kurikulum di Amerika Serikat. Lengkapnya Ia menyebutkan: "*The commonly accepted definition of the curriculum has changed from content of courses of study and lists of subjects and courses to all the experiences that are offered to learners under the auspices or direction of the school*" (Doll, 1977: 19).

Walaupun Dewey tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perubahan makna kurikulum yang mencakup seluruh pengalaman siswa di sekolah, namun para pakar kemudian menganggapnya sebagai orang pertama yang menggagas tentang kurikulum sebagai pengalaman pendidikan (*educative experience*).

Pemaknaan kurikulum seperti ini juga berkembang dalam dunia pendidikan di seluruh dunia, misalnya di wilayah Arab melalui pemikiran Yahya Handām yang menyebutkan bahwa makna kurikulum:

الخبرات التربوية التي تتيحها المدرسة للتلاميذ داخل حدودها أو خارجها بغية مساعدتهم علي نمو شخصيتهم.¹

Banyak para ahli pendidikan kemudian mengadopsi konsep ini, misalnya Hollins Caswell (1935 M.), Romine (1945 M.), J. Galen Saylor dan William M. Aleksandra (1956 M.), Harold B. Alberytycs (1965 M.), William B. Ragam (1966 M.) dan lain-lain.

Pemaknaan kurikulum sebagai pengalaman pendidikan (*الخبرات التربوية* - *educative experience*) yang diperoleh siswa, dalam penjabaran di lapangan, mengarahkan siswa untuk mampu berinteraksi dengan lingkungannya, yang akan

¹ Yahya Hamdām dan Jābir Abdul Hamīd Jābir, *Al-Manhaj, Asāsuhā, Takhtihūhā, Taqwīmuhā, . . .*, hal. 13. Pendapat senada juga disebutkan oleh Hasan Langgulung, "kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olah raga dan kesenian di dalam maupun di luar kelas yang dikelola sekolah". (Lihat: Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987), hal. 483. Konsep pengertian yang dikemukakan oleh Hasan Langgulung ini mungkin terpengaruh dengan pengertian yang dikemukakan oleh al-Syaibany dalam buku yang diterjemahkannya, dimana dalam penjelasannya yang panjang tentang pengertian kurikulum, al-Syaibani menyebutkan pengertian kurikulum sebagai "sejumlah kekuatan, faktor-faktor pada alam sekitar pengajaran dan pendidikan yang disesuaikan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luarnya, dan sejumlah pengalaman-pengalaman yang lahir dari pada interaksi dengan kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor ini. (Lihat: al-Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam, . . .*, hal. 487-486).

melatih mereka untuk hidup bermasyarakat sehingga terjadi perubahan tingkah laku (Zarkasyi: 2005, 79). Dengan pemahaman seperti ini, pendidikan di sekolah menjadi suatu yang sangat idealis, dengan harapan yang sangat menggunung, dimana kewajiban sekolah tidak hanya mengajarkan suatu materi yang telah tertulis dalam dokumen kurikulum, tetapi juga mencakup semua hal yang formal atau non-formal yang memungkinkan terjadinya perubahan sikap ke arah yang lebih positif pada diri siswa. Dengan demikian tanggung jawab sekolah menjadi sangat besar dan luas terhadap anak didik, padahal waktu yang diberikan kepada pihak sekolah sangat terbatas, dibandingkan keberadaan anak di lingkungan keluarga. Maka kalau kurikulum dianggap sebagai media dan petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar bagi guru dan pengelola sekolah dalam praktek pendidikan, maka bagaimana mungkin mereka mampu memberikan semua pengalaman kepada siswa di sekolah agar dapat menjadi ukuran pengalaman dalam hidup siswa. Hilda Taba, seperti dikutip S. Nasution menyebutkan, definisi kurikulum yang terlampaui luas sebagai pengalaman pendidikan akan mengaburkan pengertian kurikulum itu sendiri, sehingga menghalangi pemikiran dan pengolahan yang tajam tentang kurikulum (Nasution: 2006, 7).

Definisi kurikulum sebagai hanya materi pembelajaran (*course of study*) dikritik karena dianggap sebagai pemahaman yang sangat sempit. Kemudian definisi kurikulum berubah mencakup semua aktivitas di sekolah atau semua pengalaman pendidikan (*educative experience*). Definisi ini juga dikritik karena dianggap sebagai pemahaman yang sangat luas dan tidak terbatas. Nana Syaodih Sukmadinata menyebutkan pengalaman hanya akan muncul apabila terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Praktek interaksi ini oleh Johnson dianggap sebagai praktek pembelajaran, bukan kurikulum (Sukmadinata: 2004,5). Namun demikian kritikan Sukmadinata ini masih perlu dipertanyakan lebih lanjut karena pada hakikatnya praktek kurikulum secara otomatis merupakan praktek pembelajaran itu sendiri. Menanggapi kritikan tersebut, kemudian muncul makna lain tentang kurikulum. G. Wesley Soward & Mary-Margaret Scobey yang mengatakan "*The curriculum is the school's plan intentional modification of pupils behavior in the direction of agreed-upon educational goals*" (Scoby: 1968, 22).

Pandangan kurikulum sebagai rencana pembelajaran (*plan for learning*) juga berkembang di Indonesia. Diantaranya oleh S. Nasution yang menyebutkan ". . .

kurikulum dipandang sebagai suatu *rencana* yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran” (Nasution: 2006, 1). Pemahaman kurikulum yang demikian, kemudian diadopsi dalam UU Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19, tahun 2005), bab I, pasal I, ayat 13 dimana disebutkan, yang dimaksud dengan kurikulum adalah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (SPN: 2005, 11).

Kurikulum sebagai rencana pembelajaran bermuatan tujuan yang ingin dicapai, materi yang disajikan, aktifitas pembelajaran, media dan sarana yang digunakan dan juga jadwal kegiatan. Dengan demikian kurikulum tidak hanya berisi sejumlah materi, tetapi juga memuat berbagai program yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa dalam belajar, agar dapat mengantarkan siswa pada tujuan yang harus dicapai. Dengan program tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran.

Pemaknaan kurikulum seperti ini juga tidak sepi dari kritik. Salah satunya adalah konsep kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dianggap masih terlalu luas dan agak sukar diimplementasikan seluruhnya dalam pelaksanaan pendidikan. Namun demikian untuk menjaga agar kurikulum senantiasa sesuai dengan kebutuhan lingkungan, rencana pembelajaran dapat disusun sesuai dengan keadaan dan tujuan yang ingin dicapai. Apalagi kemudian dalam kurikulum dengan pemahaman ini, diberi kesempatan kepada pengelola sekolah untuk menerapkannya secara fleksibel, sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah.

Mengamati makna kurikulum yang diberikan oleh para ahli dengan berbagai modelnya (*course of study*, *educative experience* dan *plan for learning*) serta membandingkan dengan semua kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, dapat dipahami bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan kurikulum adalah program pembelajaran (*plan for learning*) yang didalamnya mencakup materi ajar (*course of study*) tertentu yang disusun sebagai untuk mengarahkan pelaksanaan pendidikan guna memberikan pengalaman pendidikan (*educative experience*) tertentu bagi siswa. Jadi tidak ada persoalan yang perlu dipertentangkan tentang semua pendapat mengenai

makna kurikulum karena antara yang satu dengan yang lainnya adalah saling melengkapi.

Di Indonesia kurikulum dipahami sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional di atas yaitu, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini secara eksplisit dapat diamati bahwa anatomi kurikulum di Indonesia mengandung tiga aspek, yaitu : tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode. Kemudian beberapa para ahli di antaranya Hilda Taba, Nana Syaodih Sukmadinata dan Oemar Hamalik menambah komponen evaluasi sebagai komponen penting kurikulum, karena evaluasi dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum (Mc Niel: 1985, 45).

Arif Furchan mengatakan, “substansi pendidikan pada dasarnya adalah refleksi atas problem-problem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat” (Furchan: 2005, 28). Apabila pernyataan ini dikaitkan dengan kurikulum, dapat dipahami bahwa secara ideal kurikulum pendidikan seharusnya mempunyai relevansi dengan kebutuhan masyarakat, atau kurikulum yang baik tidak hanya menjelaskan tentang materi saja, tetapi memberi ruang belajar dan latihan bagi siswa untuk mengadakan interaksi dengan pihak lain yaitu, guru, teman-teman, orang tua dan masyarakat. Artinya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dapat menjadi acuan untuk menjadikan siswa sebagai manusia yang bermasyarakat.

Dari pembahasan mengenai pengertian kurikulum yang diuraikan panjang-lebar di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum dalam perkembangannya dimaknai dengan tiga pemahaman berbeda, yaitu: a). Kurikulum yang menekankan pada materi pembelajaran (*course of study*). b). Kurikulum sebagai pengalaman pembelajaran (*educative experience*). c). Kurikulum sebagai perencanaan pembelajaran (*plan for learning*).

Kurikulum dan aplikasinya di Indonesia senantiasa mengalami perubahan mengikuti perkembangan sosial, politik, kebutuhan terhadap pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi. Sehubungan dengan itu, dalam UU SBN secara jelas menyebutkan bahwa kurikulum dipahami dengan makna “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Secara ideal, Kurikulum yang dipahami sebagai perencanaan pembelajaran ini disusun untuk dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dalam tiga aspek utama kehidupan manusia yaitu, (a). Memperkuat spiritual. (b). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat memenuhi tanggung jawab, dan. (c). Mengasah kepekaan sosial.

B. Kurikulum KKNI Dan Aplikasinya Di Perguruan Tinggi

Penggunaan KKNI sebagai acuan pelaksanaan pendidikan di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Berdasarkan Perpres tersebut kemudian lahir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2013, tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 2 Permen DikBud tersebut diuraikan bahwa : ayat (1). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Ayat (2) Penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal atau pendidikan informal untuk: a. menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau; b. mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari Perguruan Tinggi (Mendikbud, 2013).

Aturan-aturan lainnya yang menjadi dasar pengembangan KKNI adalah

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;

6. Permenristek Dikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
7. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.

Sebagai petunjuk operasional kemudian lahir Dokumen 1 KKNI yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015. Dalam dokumen tersebut diuraikan bahwa “KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional dan sistem penilaian kesetaraan nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia dari capaian pembelajaran, yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing”(Belmawa, 2015, 4). Selanjutnya disebutkan bahwa KKNI ini dikembangkan dengan tujuan untuk menilai unjuk kerja seseorang dalam bidang keilmuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang dilalui proses pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang telah dilampauinya sesuai jenjang tertentu (Belmawa, 2015, 4). Sehubungan dengan pernyataan ini maka untuk melengkapi KKNI pada suatu institusi, pelaksanaan pembelajaran mesti menyusun capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang baik sesuai dengan jenjang KKNI yang digariskan.

Untuk Perguruan Tinggi yang berada di bawah koordinasi Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama, disusun petunjuk khusus Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu pada KKNI dan SN Dikti, yang diterbitkan pada tahun 2018.

Secara aplikatif KKNI (menurut Perpres No. 8 Tahun 2012)² disusun dalam sembilan jenjang³ secara herarkis yaitu :

² BAB II JENJANG DAN PENYETARAAN, Pasal 2. (1) KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. (2) Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: **a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.** (3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum sebagaimana

- 1) Jenjang 1 dan 3 dikelompokkan dalam jabatan operator diduduki lulusan Diploma I (dan pendidikannya di bawahnya)
- 2) Jenjang 4 sampai 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis, diduduki oleh lulusan D2, D3, D4 dan Sarjana.
- 3) Jenjang 7 dikelompokkan dalam jabatan ahli, diduduki oleh lulusan pendidikan profesi.
- 4) Jenjang 8 dikelompokkan dalam jabatan ahli diduduki oleh lulusan magister atau spesialis 1.
- 5) Jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli diduduki oleh lulusan doktor atau spesialis 2.

Penetapan jenjang ini (1 sampai 9) dilakukan melalui pemetaan komprehensif berdasarkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, dengan melihat kepada institusi

tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini. Pasal 3 Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Pasal 4. (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan. (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja. (5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja. Pasal 5. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas: a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8; j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. Pasal 6. (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas: a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1, 2, dan 3; b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analis setara dengan jenjang 4, 5, dan 6; c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8, dan 9. (2) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi. (Lihat Perpres No. 8 Tahun 2012)

³ Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja (Lihat: Lilian Sugiharto, KPT, Ristek Dikti, hal 2)

yang menghasilkan alumni (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Kemudian Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi disusun oleh enam parameter utama yaitu (a). Ilmu pengetahuan (*science*), (b) pengetahuan (*knowledge*), (c) pengetahuan praktis (*know-how*), (d) keterampilan (*skill*), (e) afeksi (*affection*) dan (f) kompetensi (*competency*) (Belmawa, 2015, 8).

Sesuai dengan jenjang yang telah diurai di atas, Program Sarjana (S1) pada Perguruan tinggi berada pada jenjang 6 (enam) yang secara deskriptif kompetensi yang ingin dicapai secara umum adalah “(1). Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. (2). Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. (3). Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok (4). Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi”.

Secara lebih lengkap dan operasional penyusunan kurikulum KKNi di Perguruan Tinggi ditugaskan kepada Pengelola Program Studi sebagai unit terkecil dari pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan dan diperhitungkan bahwa pengelola Program Studi lebih mengetahui akan kebutuhan terhadap materi, dan bertanggung jawab untuk pengembangannya. Dengan kata lain, pengelola Program Studi mempunyai kewajiban untuk mengetahui secara mendalam tentang kebutuhan materi pada suatu Program Studi.

C. Pola Aplikasi Kurikulum KKNi

Proses Pelaksanaan Kurikulum KKNi di Perguruan Tinggi dilakukan dengan mengikuti beberapa tahap (langkah-langkah). Langkah-langkah tersebut harus dikuasai oleh pengelola PS, agar pengembangan dan penerapan KKNi dalam kurikulum berjalan secara baik. Langkah-langkah penyusunan kurikulum KKNi adalah : (1). Penetapan Profil Lulusan. (2). Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (3). Penetapan Bahan Kajian. (4). Penentuan Mata Kuliah. (5). Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah. (6). Penyusunan Struktur Kurikulum. (7). Proses Pembelajaran. (8). Penilaian. (9). Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (Diktis: 2018, 11)

Aplikasi dari 9 (sembilan) langkah penyusunannya sebaiknya dimulai Pengelola PS dengan mempelajari secara baik tentang KKNi dan cara-cara pengembangannya. Cara mempelajarinya dilakukan dengan berbagai pola. Namun secara umum diketahui bahwa cara mempelajari dapat dilakukan dengan tiga cara misalnya: (1). Belajar secara mandiri dari referensi yang terdapat secara online atau buku-buku dan jurnal hardcopy. (2). mengundang para ahli KKNi secara khusus di Prodi dan mengadakan acara workshoop, (3). Mengikutkan pengelola Prodi dalam acara pelatihan KKNi yang dilakukan pihak Fakultas atau LPM Universitas.

Setelah mempelajari secara seksama maka pelaksanaan pengembangan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Penetapan Profil Lulusan (PL) sebaiknya dilakukan dengan mengadakan workshoop di lingkungan Prodi, dengan mengundang pimpinan Fakultas, semua dosen tetap Prodi dan para pakar kurikulum. Untuk melengkapi penyusunan profil lulusan, Prodi mengundang *stake holder* (penggunaan lulusan dan mahasiswa yang layak) untuk mengetahui kebutuhan terhadap kompetensi alumni. Mengundang pimpinan fakultas untuk membahas profil lulusan dianggap penting karena jika pimpinan mengetahui profil lulusan suatu Prodi, Ia akan memahami arah pengembangan suatu Prodi dan akan mengambil kebijakan untuk memberi dukungan yang maksimal kepada Prodi dalam setiap keputusan yang diambil. Namun sebaliknya, jika para pimpinan fakultas tidak mengetahui tentang Prodi, maka kebijakan yang diambil seringkali tidak searah dengan pengembangan prodi. Adapun kehadiran semua dosen tetap dalam workshoop penentuan PL merupakan hal yang sangat vital, karena dosen adalah bagian yang tak terpisahkan dari operasi perkuliahan dan subjek utama yang mengantarkan alumni untuk mencapai profil yang diinginkan.

Mengundang *stake holder* dari kelompok pengguna lulusan adalah juga hal penting karena mereka merupakan pengguna alumni yang secara langsung mengetahui kebutuhan, kekurangan dan kompetensi alumni. Sedangkan mengundang para mahasiswa adalah juga penting karena mereka adalah partisipan pembelajaran yang membutuhkan pembelajaran secara realistik.

2. Penetapan capaian pembelajaran. Secara umum semua PS PBA unggulan menetapkan Capaian Pembelajaran (CP)⁴ merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan dan merujuk pada SNPT⁵ yang berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan umum. CP PS selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai secara umum, juga menjadi pernyataan mutu lulusan suatu PS, yang karena itu PS diwajibkan untuk memiliki rumusan CP yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari aspek isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menjadi ukuran rumusan minimal CP.

Dalam KKNI CP disusun mencakup empat unsur yaitu:

- (a). Sikap dan tata nilai: Merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak.
- (b). Kemampuan kerja: Merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
- (c). Penguasaan pengetahuan: Merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
- (d). Wewenang dan tanggung Jawab: Merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika (Belmawa, 2014, 6)

Berdasarkan kriteria CP yang terdapat dalam KKNI di atas dirumuskan capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)⁶ dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

⁴ Dalam KKNI, CPL didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penara (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

⁵ Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

⁶ Kaedah penulisan CP adalah: (1). Setiap CP menyatakan kemampuan mahasiswa yang dinyatakan dengan kalimat sederhana dan menggunakan kata kerja (verb), (2). Setiap CP gunakan hanya satu verb yang masing-masing menyatakan kemampuan penguasaan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), sikap dan tata nilai (afeksi), (3). Setiap CP sesuaikan dengan kebutuhan belajar mahasiswa (sesuai dengan level deskripsi KKNI), (4).

yang dinyatakan dalam tiga unsur yaitu: (a). Unsur Sikap (b). Unsur Pengetahuan adalah penguasaan pengetahuan dari CP KKNI yang harus dikuasai oleh alumni dan (c). Ketrampilan merupakan gabungan dari “kemampuan Kerja” dan unsur wewenang dan tanggung jawab. Ketrampilan ini terbagi kepada dua yaitu: (a1) ketrampilan umum yang merupakan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan yang tidak bergantung kepada bidang studinya. (a2). Ketrampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan PS sesuai dengan keahlian yang dipelajari. Unsur Keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan PBA, wajib disusun oleh forum PSi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh penyelenggara program studi (Belmawa, 2014, 7).

Berdasarkan uraian di atas PS kemudian membagi CPL untuk menetapkan SKL, dibagi kepada empat unsur seperti berikut:

(1). Sikap dan tata nilai. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang terdapat dalam Pasal 8, unsur utama CPL tentang sikap adalah mencakup sepuluh sikap utama seperti berikut:

- (a). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- (b). Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- (c). Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- (d). Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- (e). Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- (f). Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan ;
- (g). Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- (i). Menunjukkan sikap bertanggung-jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- (j).

Setiap CP menyatakan kemampuan mahasiswa yang dapat dilakukan assessment, (5). Setiap CP jangan menggabungkan 2 atau lebih kemampuan yg pencapaiannya tidak dapat assess dengan sebuah metoda assessment tunggal, Contoh: Mahasiswa mampu menghitung rata-rata dengan kemampuan presentasi oral dengan sikap yg profesional. (6). Setiap CP matakuliah (MK) sesuaikan dengan CPProdi, (7). CP-MK dapat di elaborasi menjadi CP yang lebih spesifik, dan dapat memiliki 4 unsur :Audience, Behavior, Condition, Degree. (Lihat: Syamsul Arifin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Sesuai KKNI, Workshop Kurikulum Pendidikan Tinggi DIREKTORAT BELMAWA -DIKTIS.

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. (Mendikbud, 2013, 6).

Setelah menentukan unsur Sikap dari SN DIKTI seperti yang disebutkan di atas, kemudian setiap PS S1 PBA dapat menambahkan sikap, karakter lain yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan PS itu sendiri.

(2). Unsur Keterampilan Umum dikembangkan dengan berpegang kepada SNPT. Menurut Pasal 8, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), terdapat tujuh unsur utama CPL tentang program sarjana adalah mampu:

(a). Menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif; (b). Mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; (c). Mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/ seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik; (d). Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik; (e). Mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung-jawabnya; (f). Mengelola pembelajaran diri sendiri; (g). Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (Mendikbud, 2013, 7).

Ketujuh kemampuan dasar yang diuraikan di atas merupakan capaian minimal yang wajib terealisasi melalui pembelajaran pada PS. Jika PS merasa ada capaian lain yang perlu dikembangkan, maka PS diberi kesempatan menyesuaikan dengan kebutuhannya.

(3). Keterampilan Khusus. Keterampilan khusus adalah sejumlah keterampilan yang harus dimiliki oleh alumni (kemampuan kerja yang terkait dengan bidang keahlian dan keilmuan tertentu). Pengembangan CPL dari aspek keterampilan khusus berpedoman kepada petunjuk yang digariskan dalam aturan KKNi. Dalam Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Yang Dikeluarkan Oleh Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Belmawa) 2014 diuraikan bahwa

menyusun “keterampilan khusus”, (a). Wajib dilakukan dengan menganalisis masukan tentang kompetensi terpakai yang dapat diperoleh dari alumni yang telah bekerja 1-3 tahun setelah lulus. Dalam hal ini mengikutkan alumni dalam diwajibkan mengundang dan mengikutkan alumni dalam dalam pembahasan CPL. (b). Menampung usulan kompetensi kerja yang dibutuhkan/diusulkan oleh berbagai *Stake holder* (pemerintah, badan hukum penyelenggara, perguruan tinggi penyelenggara, asosiasi profesi/keahlian, kolegium/konsorsium keilmuan). Sebagaimana mengundang mahasiswa, mengundang dan mengikut sertakan pengguna lulusan dalam pembahasan CPL juga merupakan suatu kewajiban, yang merupakan satu aspek penilaian dari Ban PT dalam akreditasi PS. (c). Kompetensi kerja yang relevan yang telah ditetapkan oleh badan sertifikasi yang relevan baik pada tingkat nasional maupun internasional, (d). Rumusan CPL PS sejenis yang memiliki reputasi baik di dalam dan luar negeri, (e). Standar akreditasi baik dari dalam maupun luar negeri, (f). Dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misalnya dari jurnal pendidikan. (g). Probabilitas bergesernya kompetensi kerja pada jangka pendek dan menengah (h). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (i). Perkembangan sistem pembelajaran baru (Belmawa, 2014, 11).

Bagi PS S1 PBA CPL ketrampilan khusus telah dirumuskan oleh asosiasi PS PBA. Sebagai pelengkap nya setiap PS PBA diberi kesempatan untuk mengembangkan CPL ketrampilan khusus ini dengan kriteria tertentu sesuai dengan distingsi yang dikembangkan masing-masing PS yang dapat dilihat dari peminatan yang dikembangkan.

Sebagai contoh deskripsi CPL PBA dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I
Profil Lulusan PBA

Profil Lulusan PBA S1	CPL
Pendidikan Bahasa Arab	Mampu membuat rencana pembelajaran berbagai materi Bahasa Arab.
	Mampu melaksanakan pembelajaran Bahasa Arab

(4). Unsur pengetahuan. Tingkat pengetahuan yang digunakan dalam pengembangan CPL PS S1 PBA adalah mengikuti jenjang enam dari urutan KKNI, yaitu “menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam” (Belmawa: 2014, 8). Sama seperti dalam unsur ketrampilan khusus, pengembangan CPL pengetahuan dilakukan secara seragam oleh Asosiasi PS S1 PBA. Dan Setiap PS dapat menambahnya sesuai kebutuhan dan distingsi masing-masing PS.

Untuk kelengkapan perumusan CPL PBA, sebaiknya pengembangan CPL dilakukan semua dosen MK pada PBA tersebut, sesuai kebutuhan dan pandangan para dosen yang mengasuh MK masing-masing, sehingga CPL yang dirumuskan menjadi komprehensif.

3. Penetapan Bahan Kajian. Penetapan bahan kajian, bukanlah menetapkan materi pembelajaran, namun yang dimaksud dengan Bahan Kajian adalah komponen pengetahuan yang harus dipelajari untuk memperoleh suatu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).⁷ Bahan kajian dapat merupakan suatu ilmu pengetahuan dan dapat juga bagian dari pengetahuan itu sendiri, yang ditelusuri dari berbagai jenis pengetahuan dari peta keilmuan (rumpun ilmu) suatu program studi yang sesuai kebutuhan. Identifikasi lebih jelas tentang BahanKajian diuraikan oleh Yose Rizal dkk yang menyebutkan bahwa Bahan kajian adalah suatu bangunan IPTEKS dari obyek yang dipelajari, yang yang berupa:

- (a). Ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan yang telah menjadi kesepakatan suatu program studi; (b). Pengetahuan/bidang kajian kekhasan program studi atau pembeda dengan program studi lain dan sesuai dengan visi dan misi program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pendukung; (c). Pengetahuan untuk menunjang cabang ilmu suatu program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pelengkap; (d).

⁷ Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalam dan keluasan yang mengacu pada CPL (Lihat. Ristekdikti, *Penduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi*, 2016, hal. 11)

Pengetahuan yang dikembangkan untuk perluasan dan pendalaman keilmuan pada bidang kajian atau cabang ilmu tertentu; (e). Keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa depan; dan (f). Keilmuan sebagai karakteristik Perguruan Tinggi atau ciri Perguruan Tinggi. (Yose Rizal dkk,)

Untuk melengkapi pemilihan bahan kajian, dan karena bahan kajian berkaitan dengan penentuan CPL, maka pemilihan dan penentuan bahan kajian, sebaiknya melibatkan semua dosen yang mengampu MK di Program Studi, karena kunci kelengkapan BK ada pada dosen pengampu MK. Penting diingat bahwa Bahan Kajian ini sangat berhubungan dengan ilmu yang dikembangkan pada program studi tersebut.

Selain itu, penentuan bahan kajian ini tidak terlepas dari CPL yang telah ditetapkan. Misalkan CPLnya adalah : “Mampu membuat rencana pembelajaran berbagai materi Bahasa Arab”, maka jenis pengetahuan/ilmu apa yang harus dikaji (bahan kajian) dialami seorang mahasiswa untuk sampai kepada CPL tersebut. Jawabannya adalah dapat berbentuk beberapa pengetahuan, misalnya : Konsep Kurikulum, Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran atau kajian lainnya. Satu MK dapat tersusun dari sekian banyak bahan kajian. Di mana beberapa Bahan kajian yang berdekatan dapat menjadi satu mata kuliah tertentu.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam penentuan Bahan Kajian adalah menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman diukur dengan tingkat penggunaan taxonomi Bloom (C1-C6). Sedangkan keluasan diukur dengan jumlah (banyaknya) BK yang berkaitan. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya. Untuk mempermudah menentukan kedalaman bahan kajian, pengembang kurikulum dapat menggunakan Taksonomi Bloom.

Tabel II
Contoh Pola Pengembangan BK

Capaian Pembelajaran Alumni	BK 1	BK 2	BK 3	BK 4	BK 4	BK 5	BK 6
	Qur'an	Hadits	Akhlaq	Sosio Logi	Perc. Pembl.	Media Pembl.	Qawaid
Bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa.	V	V	V				
Mampu melaksanakan pembelajaran Bahasa Arab				V	V	V	V

4. Penentuan Mata Kuliah dan Besaran SKSnya.

Mata Kuliah adalah wadah dari Bahan Kajian.⁸ Mata Kuliah merupakan efek atau konsekuensi dari bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yose Rizal dkk menyebutkan bahwa:

“ Untuk merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan yaitu: (a). Adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya. (b). Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu. (c). Adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi” (Yose Rizal dkk, 2015, 18)

Selain itu, nama mata kuliah dibuat dengan memperhatikan CPL dan Bahan Kajian dengan menyesuaikan dengan kebutuhan terhadap suatu ilmu pengetahuan. Perlu diketahui bahwa tidak semua CPL dapat menjadi MK, dan juga tidak semua BK dapat langsung menjadi MK, namun MK ditentukan dari perpaduan antara keduanya (CPL + BK) dengan pertimbangan para pakar program studi. Penentuan MK ini ditentukan dengan menggunakan format excel khusus yang di dalamnya terkandung BK dan CPL. Kedalaman CPL dirumuskan oleh masing-masing dosen sesuai dengan “tingkat kata operasional” dari C1 - C6, yang dipakai dalam uraian CPL tersebut. Sedangkan keluasan ditentukan dengan banyaknya Bahan Kajian yang berhubungan dengan CPL

⁸ Panduan Ringkas Menyusun KPT (Jakarta: Dikti) hal. 11

tersebut. Penentuan MK diperoleh dari perkalian jumlah kedalaman dengan jumlah keluasan, kemudian dibagi "sigma' (jumlah keseluruhan kedalaman dikali jumlah keseluruhan keluasan), kemudian dikali jumlah sks secara keseluruhan. Dari penjumlahan tersebut, maka akan lahir MK dengan besaran SKS yang dibutuhkan. Penentuan MK ini harus dilakukan oleh tim ahli KKNI yang ada di Program Studi. Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, penyusunan ini sebaiknya didampingi oleh pakar yang ada di PS.

Perlu diperhatikan bahwa secara umum MK di sebuah program studi terbagi kepada empat jenis, yaitu MKU (Mata Kuliah Universitas), MKF (Mata Kuliah fakultas) dan MKP (Mata Kuliah Program Studi). Sebaiknya sebelum perumusan MK dilakukan perlu diklasifikasi terlebih dahulu perkiraan jumlah SKS yang dibutuhkan pada setiap jenis tersebut. Jumlah MKU ditentukan oleh tim Universitas, MKF ditentukan oleh tim Fakultas, dan PBA hanya membahas MK yang berhubungan dengan keahlian PS.

5. Penyusunan Struktur Kurikulum.

Langkah selanjutnya dari pengembangan kurikulum KKNI adalah merancang struktur kurikulum.

Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan. Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat (Yose Rizal, 2015, 20).

Nilai positif dari model serial ini adalah, jika dia mampu menyelesaikan serial MK secara baik mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan akan mempunyai ilmu yang komprehensif. Persoalan yang dihadapi dalam penyusunan MK berdasarkan model serial adalah jika seorang mahasiswa gagal dalam MK serial sebelumnya, maka dia tidak dapat melanjutkan MK lanjutan, yang berakibat kepada pelambatan penyelesaian dalam MK tertentu. Selain itu mahasiswa juga tidak dapat mengambil MK lanjut semester di atasnya untuk MK serial tersebut, karena mereka belum menyelesaikan MK sebelumnya. Problematika lain juga dapat muncul dalam penggunaan model, di mana jika

dosen antar MK berkelanjutan tidak saling berkomunikasi, seringkali kelanjutan perkuliahan tidak memberi kemampuan yang komprehensif kepada anak didik.

Struktur kurikulum model serial ini kemudian didistribusikan dalam MK per semester. Pembagian MK dilakukan secara seimbang, dengan mendahulukan MK tertentu untuk kepentingan tertentu. Misalnya MK pra syarat harus didahulukan untuk memenuhi syarat MK selanjutnya. Atau seringkali MK di semester awal akan menjadi pra syarat untuk semester berikutnya.

Walaupun struktur model serial mempunyai persoalan, karena MK harus diselesaikan secara berurutan, struktur kurikulum serial ini menjadi model pilihan dalam pengembangan struktur yang dipakai di Perguruan Tinggi. Di Prodi pendidikan bahasa Arab struktur kurikulum serial ini terlihat dalam MK yang (terkadang) diberi nomor, misalnya Muhadatsah I, Muhadatsah II, Muthalaah I, Muthalaah II, Nahwu I, Nahsu II, dst. Selain itu juga terlihat pada MK tidak bernomor tetapi harus berurutan, misalnya MK teori mengajar, harus didahulukan sebelum MK Praktek mengajar, MK Penelitian harus didahulukan sebelum masa penulisan skripsi, dan seterusnya.

Model lain dari struktur kurikulum adalah model paralel. Model paralel yaitu :

“ . . . model menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel ini secara ekstrim sering dijumpai dalam model Blok di Program Studi Kedokteran atau program studi lainnya. Model Blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok, sehingga sering pula disebut sebagai model modular, karena terdiri dari beberapa modul/blok. Akan tetapi, struktur kurikulum paralel tidak hanya dilaksanakan dengan model Blok, bisa juga dalam bentuk semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis.” (Yose Rizal, 2015, 20).

Dengan cara ini pada setiap semester mahasiswa akan mengarah pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang serupa (dalam ilmu yang berdekatan) dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya. (Hasan, 2016, 11.).

Dengan rancangan struktur kurikulum yang baik mahasiswa akan dapat menyelesaikan kuliah secara teratur dan membantu mereka untuk mempercepat menyelesaikan perkuliahan.

6. Proses Pembelajaran.

Proses pembelajaran adalah suatu bagian yang sangat penting dalam pembahasan kurikulum. Suatu kurikulum yang baik, tidak akan mendapat hasil terapan yang baik, jika penerapan kurikulum dalam pembelajaran tidak berlangsung secara baik. Sehubungan dengan ini beberapa hal yang sangat penting dalam penerapan pembelajaran adalah : (a). Kualitas Kurikulum. Kualitas kurikulum sangat ditentukan oleh kemampuan pihak pengembang kurikulum untuk membahas kurikulum sesuai dengan kebutuhan suatu masyarakat terhadap kurikulum. Untuk itu pembahasan kurikulum harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap meliputi para pakar dalam bidangnya, dosen ahli atau pengampu suatu ilmu di suatu prodi, pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi dan stake holder atau penggunaan lulusan. Mereka ini diharapkan mampu membahas suatu bidang kurikulum secara komprehensif dan melahirkan pemikiran yang matang, karena mereka mengetahui kebutuhan dan arah dari setiap kurikulum. Pembahas kurikulum tidak cukup dilakukan oleh hanya beberapa orang yang hanya mengetahui pengetahuan secara terbatas dalam suatu bidang ilmu. Jika suatu Prodi tidak memiliki para pakar yang cukup untuk pembahasan kurikulum, maka diharapkan program studi tersebut untuk mengundang para ahli dari perguruan tinggi lain untuk ikut serta membahas kurikulum.

(b). Kemampuan Dosen dalam penerapan pembelajaran. Dosen adalah ujung tombak penerapan kurikulum. Keberhasilan penerapan kurikulum sangat ditentukan oleh kemampuan dosen menerapkan isi kurikulum dalam pembelajaran di ruang kuliah. Pada zaman dahulu banyak dosen mengasuh berbagai MK tanpa keahlian untuk menambah kekurangan dosen. Dewasa ini dosen ditetapkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki, yang dibuktikan oleh adanya ijazah sekurang-kurangnya setingkat master yang terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidik. Pada umumnya seorang dosen hanya mampu mengampu satu MK keahlian ditambah satu atau dua MK lain yang berdekatan. Dengan demikian tidak diharapkan seorang dosen mengampu MK yang bukan keahlian, karena akan membuat pembelajaran tidak akan mencapai hasil yang baik. Menurut aturan yang dipakai dalam proses akreditasi BAN-PT, saat ini sebuah program studi diharuskan memiliki (paling kurang) enam dosen tetap

yang mempunyai bidang ilmu yang sesuai dengan keahlian program studi. Aspek lain yang dibutuhkan dari keahlian dosen adalah kemampuan mereka dalam menggunakan berbagai metode dan media dalam pembelajaran. Artinya, jika di suatu program studi belum terdapat enam orang dosen tetap sesuai bidang, maka preogram studi tersebut tidak akan mendapatkan akreditasi dari BAN-PT.

Untuk peningkatan kualitas dosen, maka dalam diri dosen perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa sebanyak apapun pengetahuan yang dimiliki, pada dasarnya ilmu tersebut masih kurang dan perlu bagi dosen untuk terus belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan secara berkesinambungan, dengan berbagai cara baik melalui pendidikan formal dan resmi, maupun melalui berbagai kegiatan lain seperti work shop, diskusi, pelatihan, penataran, seminar dan lain-lain. Dalam hal ini pembelajaran perlu berlangsung sepanjang hidup, bukan hanya karena takut ketinggalan ilmuny dibandingkan para mahasiswa yang diampu, tetapi juga untuk memenuhi *curiosity* yang dimiliki.

(c). Penggunaan Pendekatan, metode dan media. Aspek lain yang dibutuhkan dari keahlian dosen “terhadap usaha peningkatan terapan kurikulum” adalah kemampuan mereka dalam menggunakan pendekatan pembelajaran. Saat ini terkadang dalam pembelajaran, dosen menggunakan pola pembelajaran yang terpusat pada dosen (*Teaching Centered Learning/TCL*). Pola ini dianggap tidak lagi memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis capaian pembelajaran. Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyebutkan : Sekurangnya terdapat tiga alasan yang dapat dikemukakan antara lain adalah: (a). Perkembangan ilmu pengetahuan dan seni yang sangat pesat, membuat dosen sulit untuk dapat memenuhi dan menguasai semua ilmu pengetahuan secara lengkap untuk diberikan kepada mahasiswa. (b). Perubahan kompetensi kekayaan yang berlangsung sangat cepat memerlukan materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel. (c). Kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipasi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi (Belmawa: 2014, 52).

Dalam panduan Penyusunan Kurikulum Dikti disebutkan bahwa Prinsip pembelajaran menurut SN-Dikti harus dilakukan secara : (1). interaktif, (2). holistik, (3). integratif, (4). saintifik, (5). kontekstual, (6). tematik, (7).efektif,

dan (8). berpusat pada mahasiswa. (Nurwardani dkk, 2016, 45). Sehubungan dengan itu maka diadakan perubahan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran di Perguruan Tinggi, yaitu dengan menggunakan paradigma pembelajaran terpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning/TCL*). Dengan penggunaan paradigma ini

“ . . . diharapkan semua capaian pembelajaran lulusan akan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreatifitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Selain itu mahasiswa didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri dan berusaha secara keras mencapai hasil yang diinginkan (Belmawa: 2014, 8).

Dengan demikian semua kemampuan dan potensi mahasiswa akan tergali secara maksimal melalui proses pembelajaran di kelas ataupun melalui proses pembelajaran di luar kelas.

Perubahan pendekatan dalam pembelajaran dari TCL menjadi SCL adalah perubahan paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang beberapa hal dalam pembelajaran, yakni; a) **pengetahuan**, dari pengetahuan yang dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa, menjadi pengetahuan dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar, b) **belajar**, belajar adalah menerima pengetahuan (pasif-reseptif) menjadi belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan, aktif dan spesifik caranya, c) **pembelajaran**, dosen menyampaikan pengetahuan atau mengajar (ceramah dan kuliah) menjadi dosen berpartisipasi bersama mahasiswa membentuk pengetahuan (Belmawa: 2014, 8).

Paradigma baru ini kemudian memberikan beberapa perubahan terhadap pola pembelajaran. Hal ini berhubungan dengan prinsip wajib yang dimiliki SCL yaitu:

(a). Memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang belum lengkap. (b). Memandang proses belajar sebagai proses untuk merekonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari dan (c) Memandang pembelajaran bukan sebagai proses pengajaran (teaching) yang dapat dilakukan secara klasikal, dan bukan merupakan suatu proses untuk menjalankan sebuah instruksi baku yang telah dirancang (Belmawa: 2014, 8).

Perubahan paradigma ini sangat penting, karena perubahan zaman memberi kesadaran kepada anak didik bahwa diri mereka bukan hanya sebuah

tong kosong yang siap diisi, tetapi mereka merupakan seorang anak manusia yang mempunyai potensi diri yang siap dikembangkan. Sehubungan dengan itu dosen pengampu MK wajib memberi kesadaran dan memotivasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Efek dari perubahan paradigma ini adalah juga perubahan sistem penilaian dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk rekspresif sesuai dengan kemampuan atau potensi dirinya.

(d). Ketersediaan prasarana dan sarana.

Secara Etimologis (bahasa) Prasarana adalah alat yang dipakai secara tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah alat yang dipakai secara langsung untuk mencapai tujuan pendidikan misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium. (Yudhi, 2012, 2).⁹

Ketersediaan prasarana dan sarana merupakan bagaian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran pada suatu institusi pendidikan. Hal ini berhubungan dengan sistem pendidikan yang dianut di zaman modern, dimana dalam pembelajaran anak didik membutuhkan kenyamanan, dan membutuhkan berbagai alat untuk membantu pembelajaran. Untuk kenyamanan, peserta didik membutuhkan gedung perkuliahan yang membuat mereka mengikuti perkuliahan secara baik. Di samping itu untuk memenuhi bahan bacaan, mahasiswa membutuhkan perpustakaan yang dilengkapi dengan referensi yang mencukupi, baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk softcopy dan perpustakaan firtual. Demikian halnya untuk melakukan praktek, peserta didik membutuhkan laboratorium yang mencukupi mencakup laboratorium MIPA, laboratorium Bahasa, laboratorium Multi media dan laboratorium lainnya. Selain itu juga dibutuhkan prasarana/sarana untuk peribadatan, olah raga, seni dan lain-lain.

Jika kurikulum telah tersusun secara baik, namun jika dalam penerapannya, tidak dilengkapi dengan prasarana dan sarana (fasilitas) yang dibutuhkan, maka penerapan kurikulum tidak akan berjalan secara maksimal.

⁹ Alex Aldha Yudi, *Pengembangan Mutu Pendidikan Ditinjau Dari Segi Sarana Dan Prasarana (Sarana Dan Prasarana PPLP)*, Dalam Jurnal Cerdas Sifa, Edisi No.1. Mei – Agustus 2012, hal. 2.

(e). Monitoring.

Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses perkuliahan. Melalui monitoring akan diketahui hal-hal yang sudah berjalan secara baik dan hal-hal yang membutuhkan penyempurnaan dalam perkuliahan. Aspek-aspek yang dimonitor dalam perkuliahan adalah kegiatan-kegiatan perkuliahan mencakup, keberadaan dan persyaratan dosen, kedisiplinan (mahasiswa dan dosen), rencana pembelajaran, prasarana/sarana, proses pembelajaran, sampai tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Hasil monitoring ini menjadi modal penilaian dasar untuk menentukan tindak lanjut yang dibutuhkan. Jika proses perkuliahan telah berlangsung secara baik sesuai program yang direncanakan, maka perlu diambil langkah-langkah yang sigap untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya, dan jika dari monitoring diketahui bahwa target yang diinginkan belum tercapai maka dibutuhkan langkah-langkah yang kongkrit untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses perkuliahan.

Untuk menyempurnakan proses monitoring ini, Perguruan Tinggi biasanya merencanakan monitoring secara baik, dan membuat pedoman-pedoman monitoring yang akan dipergunakan secara tersistem dan terstruktur, sehingga monitoring berjalan secara baik menuju ketercapaian kurikulum secara sempurna.

8. Penilaian/Evaluasi.

Langkah lanjut dari penyusunan kurikulum setelah monitoring adalah evaluasi kurikulum. artinya monitoring dan evaluasi adalah dua langkah yang beriringan.

Yang dimaksudkan dengan evaluasi di sini adalah evaluasi kurikulum yaitu penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan (Adnan: 2017, 111). Evaluasi kurikulum ini dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu: (a). Perbaikan Program. Dalam konteks, peranan evaluasi kurikulum yang dilakukan bersifat konstruktif, dimana setelah kurikulum disusun dan diberlakukan dilakukan evaluasi untuk menjangkau informasi tentang kualitas kurikulum dan penerapannya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Jika terdapat kekurangan maka penanggung jawab kurikulum perlu memperbaikinya. (b). Evaluasi kurikulum dilakukan untuk pertanggungjawaban

kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Terdapat berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kurikulum, misalnya pemerintah, dan stake holder, yang senantiasa berkaitan dengan hasil terapan kurikulum. (c). Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. (R. Ibrahim Dkk, tt, 4). Yang dimaksudkan dengan tindak lanjut di sini adalah jika dalam evaluasi kurikulum diperoleh suatu kekurangan, maka pihak yang berkompeten agar segera melakukan perbaikan dengan memperbaiki kekurangan yang ditemukan melalui tindakan yang nyata, sehingga kurikulum menjadi lebih baik, dan memperoleh hasil terapan seperti yang diharapkan. Anik Ghufron menyebutkan bahwa terhadap beberapa tahapan (umum) dari evaluasi kurikulum yaitu (a). Menentukan pendekatan dalam melakukan evaluasi (Internal vs Eksternal). (b). Mengembangkan instrumen evaluasi. (c). Mengumpulkan data. (d). Analisis dan interpretasi data dan (e). Tindak Lanjut (Ghufron, 2010,9). Jika melihat dari tahapan evaluasi kurikulum yang dilakukan maka untuk melaksanakan evaluasi kurikulum ini, penyusun dan pihak pengguna kurikulum perlu menyusun tim yang baik, agar dapat menjaring informasi dari berbagai pihak, secara terprogram, sehingga langkah evaluasi dapat dilanjutkan sesuai dengan tujuan evaluasi itu sendiri.

9. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.

Penyusunan rencana pembelajaran per semester dilakukan sebagai langkah akhir dari penyusunan kurikulum. Setelah penyusun kurikulum menentukan mata kuliah yang akan disajikan kepada mahasiswa, baik dengan menggunakan sistem serial maupun dengan menggunakan sistem serial maupun sistem paralel, maka mata kuliah tersebut akan didistribusikan ke dalam perkuliahan dalam setiap semester, dari semester I sampai semester terakhir.

Agar perencanaan perkuliahan berjalan secara baik, maka kepada pengasuh MK diharapkan menyusun RPS untuk setiap MK yang diasuh. Penyusunan RPS ini dilakukan sebelum perkuliahan dimulai dan merupakan pra syarat bagi dosen pengampu MK.

Penyusunan RPS ini mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi nomor 44 tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian keempat tentang Standar Proses Pembelajaran, yang terdapat dalam Pasal 12, yang menyebutkan:

- (1). Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
- (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

- (2). RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3). RPS paling sedikit memuat: (a). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (b). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e). Metode pembelajaran; (f). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h). Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i). Daftar referensi yang digunakan.
- (4). RPS wajib ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5). Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- (6). Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- (7). Asesmen atau penilaian adalah satu atau lebih proses yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator dari kemampuan akhir yang dicapai oleh mahasiswa. Penilaian meliputi ranah sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan. Bnetuk penilaian dapat berupa tes ataupun non-tes.
- (8). Metoda pembelajaran adalah cara atau tahapan belajar yang dilakukan seorang mahasiswa dalam sebuah proses pembelajaran, di mana seorang mahasiswa akan berinteraksi dengan sumber-sumber belajar, dosen dan lingkungan belajarnya.

(9). Materi pembelajaran adalah subjek pembelajaran yang diturunkan berdasarkan bahan kajian yang dibebankan pada mata kuliah, dan dikandung oleh CPMK maupun Sub-CPMK. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam pokok bahasan-sub pokok bahasan, atau tematik-tematika yang dikemas sebagai bahan ajar (buku ajar, modul ajar, diktat, dll)

Berdasarkan amanat ini, selain mewajibkan dosen menyusun RPS, kepada pimpinan institusi melalui bagian yang ditunjuk, sebaiknya menyusun format RPS yang berlaku di suatu Perguruan Tinggi, sehingga format RPS antar dosen menjadi seragam.

Secara lebih khusus perlu ditambahkan di sini bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kalangan luar orang Arab, paling tidak ada empat orientasi pendidikan bahasa Arab. Pemetaan orientasi berikut menjadi sangat penting untuk memposisikan dan menentukan arah pengembangan kurikulum PBA ke depan. Pertama, orientasi religius, yaitu belajar bahasa Arab untuk tujuan memahami dan memahamkan ajaran Islam (*fahm al-maqrû'*). Orientasi ini terlihat pada belajar dan pembelajaran keterampilan reseptif/*mahârah istiqbâliyyah* (menyimak dan membaca), dan terlihat pula pada belajar dan pembelajaran keterampilan ekspresif-produktif/*mahârah ta'bîriyyah-intâjiyyah* (berbicara dan menulis) (Wahab: 2016, 34). Dari ini dapat dipahami bahwa secara khusus pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab haruslah dirancang untuk dapat mencapai empat tujuan tersebut. Dan diyakini pengembangan kurikulum KKNi yang sempurna serta dilaksanakan secara baik, akan dapat mengantarkan anak didik untuk mencapai tujuan umum tersebut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

I. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji kurikulum KKNI yang berlaku pada program studi Pendidikan Bahasa Arab, pada program studi unggul yang unggul di Indonesia. Namun sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengadakan kajian perpustakaan untuk merumuskan kajian teoritis yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Untuk itu *library reseach* merupakan suatu bagian penting yang dilakukan untuk menyelesaikan sebagian dari penelitian ini. Adapun untuk penelitian lapangan, dirancang untuk menggunakan metode kualitatif.

(Syamsuddin AR dan Vismaia S. Damianti, 2006, hal. 73-74).¹⁰ Metode penelitian kualitatif¹¹

¹⁰ Beberapa para ahli masih ragu-ragu atau belum mempunyai pandangan yang jelas tentang metode kualitatif. Syamsuddin AR dalam buku *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, halaman 20 menyebutkan bahwa kualitatif merupakan suatu jenis penelitian. Kemudian pada halaman 73, Syamsuddin menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian, tetapi pada halaman 74 Syamsuddin menyebutkan kualitatif sebagai "metode", seperti dalam ungkapan pada kutipan berikut "penelitian yang menggunakan metode kualitatif percaya . . .". Menyebutkan beberapa istilah untuk dipadankan dengan kata "kualitatif" ini, menunjukkan bahwa Syamsuddin belum mempunyai suatu pandangan yang tegas tentang penelitian kualitatif. (Lihat: Syamsuddin AR dan Vismaia S. Damianti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 73-74). Dalam beberapa tulisan yang diedit oleh Julian Brannen juga tidak ada ketegasan dan cenderung agak ragu-ragu tentang apakah kualitatif itu sebuah metode atau sebuah pendekatan (Lihat: Julian Brannen (ed), *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 12-13). Sugiono dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, juga tidak memastikan apakah "kualitatif dan kuantitatif" itu sebuah pendekatan ataukah sebuah metode penelitian. Pada judul buku, Sugiono menyebutkannya sebagai pendekatan, tetapi pada banyak tempat dalam buku tersebut ia menyebutnya sebagai metode. (Lihat: Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 1, 13, 14, 15 dst). Dalam kamus Oxford disebutkan *method* mempunyai makna "(1) *Prosedure for attaining an object*. (2). *a way of doing anything . . . according to a devined and regular plan, a mode of procedure in any activity*, . . . (Lihat: *The Oxford English Dictionary*, (Oxford: At The Clarendon Press, 1978), cet. III, hal. 394.) Metode merupakan suatu cara dalam pelaksanaan, dan bersifat prosedural, artinya pemilihan metode dapat dilakukan dengan disesuaikan situasi dan kondisi. Sedangkan pendekatan adalah suatu yang bersifat axiomatic (kebenaran yang tak perlu lagi diragukan), yang menjadi dasar pijakan filosofi suatu aktifitas. Menurut Noeng Muhajir, dalam penelitian terdapat empat pendekatan yaitu: pendekatan positivistik, pendekatan rasionalistik, pendekatan fenomenologik dan pendekatan realisme metaphisik. (Lihat: Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), Ed. III, cet. VII, hal. 21, 53, 81 dan 143).

¹¹ Dalam beberapa tulisan yang diedit oleh Julian Brannen juga tidak ada ketegasan dan cenderung agak ragu-ragu tentang apakah kualitatif itu sebuah metode atau sebuah pendekatan (Lihat: Julian Brannen (ed), *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,

merupakan metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diproses melalui sistem statistik atau bentuk hitungan lainnya, sebagian datanya bisa saja dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif (Lexi J. Moleong, 2002. hal. 3). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan pendekatan fenomenologik (Noeng Muhajir, 1996, hal. 21, 53, 81 dan 143). Penelitian ini mengikuti model *grounded research* yang dipadukan dengan model paradigma naturalistik. Secara sederhana dalam teori model *grounded research* diyakini bahwa konsep harus dibangun berdasarkan pengalaman (emperi), dan teori harus dibangun dari data yang tersedia. Jadi dalam teori model *grounded research*, pengalaman dan data merupakan dua hal yang sangat penting. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang sesuai untuk penelitian ini karena penelitian ini merupakan penelitian yang mengamati teks, realitas dan gejala-gejala dari aktifitas yang nyata. Kurikulum dan prakteknya bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.

II. Sumber Data

Sumber data dari penelitian tentang kurikulum KKNi ini dikumpulkan dari beberapa program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang unggul, atau berakreditasi A dari Ban-PT, yaitu PBA UIN Ar-Raniry Banda Aceh, PBA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PBA UIN Maulana Malik Ibrahim, PBA Universitas Negeri Jakarta, Dan PBA Universitas Negeri Malang.

Data tersebut dikumpulkan dari :

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 12-13). Sugiono dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, juga tidak memastikan apakah "kualitatif dan kuantitatif" itu sebuah pendekatan ataukah sebuah metode penelitian. Pada judul buku, Sugiono menyebutkannya sebagai pendekatan, tetapi pada banyak tempat dalam buku tersebut ia menyebutnya sebagai metode. (Lihat: Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 1, 13, 14, 15 dst). Dalam kamus Oxford disebutkan *method* mempunyai makna "(1) *Prosedure for attaining an object*. (2). *a way of doing anything . . . according to a devined and regular plan, a mode of procedure in any activity, . . .* (Lihat: *The Oxford English Dictionary*, (Oxford: At The Clarendon Press, 1978), cet. III, hal. 394.) Metode merupakan suatu cara dalam pelaksanaan, dan bersifat prosedural, artinya pemilihan metode dapat dilakukan dengan disesuaikan situasi dan kondisi. Sedangkan pendekatan adalah suatu yang bersifat axiomatic (kebenaran yang tak perlu lagi diragukan), yang menjadi dasar pijakan filosofi suatu aktifitas. Menurut Noeng Muhajir, dalam penelitian terdapat empat pendekatan yaitu: pendekatan positivistik, pendekatan rasionalistik, pendekatan fenomenologik dan pendekatan realisme metaphisik. (Lihat: Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), Ed. III, cet. VII, hal. 21, 53, 81 dan 143).

1. Dokumen, yaitu: (a). Dokumentasi aturan-aturan pengembangan kurikulum yang digunakan program studi PBA. (b). Dokumentasi administrasi proses pengembangan kurikulum. (c). Teks kurikulum yang telah dibukukan yang dipakai dalam praktek pembelajaran bahasa Arab. (d). Aturan-aturan penerapan kurikulum dalam pembelajaran.
2. Peristiwa. Jika ditemukan peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung dari peristiwa pengembangan kurikulum, jika tidak ditemukan, maka penelitian dilakukan melalui telaah dokumentasi proses pengembangan dan wawancara. (b). Mengadakan pengamatan secara langsung dari peristiwa penerapan kurikulum di lapangan. Temuan-temuan tersebut kemudian dirumuskan secara teoritis berdasarkan fenomena yang ada (Lexi J. Moleong, 2002. hal. 72).
3. Informan, yaitu para dosen yang terkait dan mempunyai informasi penting yang berhubungan dengan penelitian ini. Mengingat yang dicari sebagai data adalah praktek-praktek pembelajaran yang alami, maka informan dalam penelitian ini dipilih oleh peneliti yang memungkinkan mendapat informasi yang akurat secara alami atau mendekati persoalan yang diteliti. Informan utama merupakan beberapa orang nara sumber yang memiliki kedekatan dengan masalah yang diteliti seperti yang disebut di atas. Selain itu, para informan dapat berkembang dengan sistem (*snow-balling*), apabila ada informasi yang berkaitan topik bahas penelitian.

III. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat bantu pada waktu penelitian menggunakan sesuatu metode (Suharsimi Arikunto, 2002, ha. 156). Setiap metode pengumpul data mempunyai instrumen tersendiri, yang disesuaikan dengan keperluannya masing-masing.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga metode yaitu telaah dokumentasi, wawancara dan pengamatan. Untuk lebih praktisnya, maka peneliti membuat beberapa instrumen pengumpul data sesuai metode tersebut, seperti berikut :

1. Telaah dokumentasi, instrumennya adalah pedoman dokumentasi dan *check list*.
2. Wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara.
3. Observasi, instrumennya adalah pedoman observasi, kamera dan lain-lain.

Dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan secara disengaja, maka diharapkan semua informasi penting dapat diperoleh secara maksimal. Walaupun demikian sesuai dengan kaedah metode penelitian, bahwa dalam metode kualitatif, salah satu kriterianya adalah, manusia langsung menjadi instrumen. (Lexi J. Moleong, 2002. hal. 4-8).

Dari itu, secara umum, maka instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, melalui pengamatan yang dalam.

Sewaktu melakukan wawancara, pada dasarnya penulis mengajukan pertanyaan terstruktur yang telah dipersiapkan melalui pedoman wawancara. Namun demikian, dalam wawancara tersebut akan sangat sering pembicaraan berkembang berdasarkan opini yang dibuat oleh informan. Karena itu maka tidak jarang juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul menjadi pertanyaan tidak terstruktur, namun penulis berusaha agar pembicaraan tidak keluar dari kontes.

Kelebihan dari menjadikan peneliti sebagai alat atau instrumen adalah peneliti dapat memberikan penilaian terhadap sebuah data, sehingga dapat langsung memutuskan perlu/tidaknya data tersebut, secara fleksibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Identifikasi Lapangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lima Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab di berbagai universitas di Indonesia yang mempunyai akreditasi A. Beberapa Prodi dimaksud adalah:

1. PS PBA S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

PBA UIN Ar-Raniry dibuka pertama kali pada tahun 1964,. Saat itu UIN Ar-Raniry masih berstatus IAIN dan dipimpin oleh Prof. Ali Hasymy dan merupakan afiliasi dari IAIN Syarif Hidayatullah - Jakarta (PBA: 2019, 2). Saat ini PBA UIN Ar-Raniry merupakan satu PS di lingkungan Fak. Tarbiyah dan Keguruan, dan telah melakukan akreditasi sebanyak tiga kali. Akreditasi BAN PT pertama dilakukan pada tahun 2007 dan mendapat nilai B, dengan nomor SK no. 28/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007, tanggal 26 November 2007. Akreditasi kedua dilakukan pada tahun 2013 dan memperoleh nilai A berdasarkan SK no. 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013. Akreditasi selanjutnya dilakukan pada tahun 2018 dan kembali memperoleh nilai A berdasarkan SK no. 2204/SK/BAN PT/Akred/S/VIII/2018, yang berlaku sampai 15 Agustus 2023. Dengan demikian PBA UIN Ar-Raniry telah memperoleh akreditasi A dari BAN PT sebanyak dua kali. Saat ini PBA UIN Ar-Raniry dipimpin oleh Dr. A. Mufakhir Muhammad, MA

Visi PBA UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah:

“Menjadi PS PBA yang unggul, profesional, inovatif dan berwawasan keislaman dalam menyiapkan pendidik dan praktisi pendidikan Bahasa Arab pada tingkat regional pada tahun 2030”

Dari visi tersebut terlihat bahwa visi PBA UIN Ar-Raniry mengandung beberapa unsur utama yaitu:

- (1). PS PBA yang unggul, profesional, serta berwawasan keislaman
- (2). Menyiapkan pendidik dan praktisi pendidikan
- (3). Tingkat Regional
- (4). Tahun 2030

Wawasan keislaman adalah ciri khas sebagai implementasi Aceh sebagai wilayah otonomi yang memberlakukan hukum syariat Islam. Adapun ungkapan “menyiapkan pendidik dan praktisi pendidikan” adalah pernyataan profil PS yang

dijelmakan dalam visi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa semua pihak yang berkaitan dengan PS ini menyadari akan orientasi dari PS PBA UIN Ar-Raniry. Walaupun terlihat bahwa visi ini telah sempurna, namun sangat lebih baik jika dalam visi juga disebut aspek distingsi PS sebagai aspek khas yang membeda suatu PS dengan PS lain.

Dari visi ini kemudian dikembangkan lima misi yang diemban oleh PS PBA UIN Ar-Raniry, yaitu :

- (1). Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran Bahasa Arab yang inovatif yang menghasilkan lulusan yang profesional dan berwawasan keislaman.
- (2). Mengembangkan riset di bidang pendidikan Bahasa Arab secara inovatif, integratif sebagai basis peningkatan mutu pembelajaran Bahasa Arab.
- (3). Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa Arab yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.
- (4). Mengupayakan sarana dan prasarana pembelajaran Bahasa Arab yang berkualitas dalam menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (5). Menjalinkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam menyiapkan dan meningkatkan kualitas guru dan praktisi pendidikan Bahasa Arab. (PBA:2019,6)

Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian PBA mengembangkan dan menyusun profil alumni PS dengan mengundang sebagian dosen tetap dan pimpinan Fakultas (Tarbiyah dan Keguruan), dan dilengkapi dengan kehadiran *stakeholder*. Dari pembahasan profil tersebut, kemudian lahir profil alumni PBA UIN Ar-Raniry yaitu :

- (1) Pendidik/Praktisi pendidikan
- (2) Asisten Peneliti Pendidikan
- (3) Pengembang Bahan Ajar
- (4) Penterjemah/Arabicpreneur

Berdasarkan profil alumni tersebut dikembangkan kurikulum yang sekarang ini diwajibkan menggunakan kurikulum KKNI. Dalam usaha pengembangan kurikulum KKNI ini, PBA ikut serta dengan semua PS lain yang ada di Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dalam workshoop pengembangan Kurikulum KKNI yang dilakukan di Fak. Tarbiyah. Setelah dibahas dalam workshoop tersebut kemudian hasilnya dibahas pada tingkat *al-Jamiah* (Universitas) di LPM.

Untuk menjadi alumni dari PBA UIN Ar-Raniry, mahasiswa diwajibkan lulus atau menyelesaikan sebanyak . . . SKS. Saat ini PBA UIN Ar-Raniry memiliki dosen tetap PS sebanyak 32 orang,

2. PS PBA S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PBA UIN Syarif Hidayatullah dibuka pada tahun 1957, bersamaan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam (FITK, 2018, 3). Dari tahun pendiriannya sampai sekarang, PBA UIN Syarif Hidayatullah telah dipimpin secara bergantian oleh sekian banyak para ahli bahasa Arab di Indonesia. Sekarang PS ini dipimpin oleh Dr. Zainal Asikin, MA. Saat ini PBA UIN Syarif Hidayatullah mempunyai akreditasi A dari BAN PT, yang ditetapkan berdasarkan nomor 2707/SK/BAN-PT/akred/S/XI/2016, tanggal 24 November 2016.

Visi dari PBA UIN Syarif Hidayatullah adalah “Menjadi Prodi PBA yang unggul di bidang penguasaan konten dan metodologi pembelajaran pada tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Dalam visi di atas terlihat jelas beberapa unsur penting dari visi PBA UIN Syarif Hidayatullah, yaitu :

- (1). PS PBA yang unggul
- (2). Penguasaan konten dan metodologi pembelajaran
- (3). Tingkat nasional dan internasional
- (4). Tahun 2025.

Sekilas terlihat bahwa visi tersebut sudah baik dan sempurna, namun sebenarnya, di dalam sebuah visi PS sebaiknya, juga mengandung ciri khas dari PS tersebut dibandingkan PS sejenis yang terdapat di universitas lain. Inilah yang disebut sebagai *distingsi* PS. Selain itu dalam sebuah visi, kata-kata digunakan harus jelas atau dijelaskan melalui makna kata. Tetapi kata internasional di dalam visi agak susah untuk dipahami, karena internasional terdiri dari berbagai negara yang belum tentu berada dalam wilayah yang berdekatan dan mempunyai kualitas dan kedudukan yang seimbang. Sehingga ungkapan “unggul di tingkat internasional” agak sulit dipahami.

Dari visi yang diuraikan di atas, kemudian PBA UIN Syarif Hidayatullah mengembangkan misi yang dilaksanakan yaitu :

- (1). Menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Arab yang unggul, kompetitif dan profesional.
- (2). Memajukan Pendidikan Bahasa Arab sebagai institusi akademik terkemuka.
- (3). Mengembangkan Bahasa Arab sebagai keilmuan, pengembangan studi Islam yang berbasis penguasaan literatur Arab, kemampuan berkomunikasi, tradisi penelitian, dan profesi kependidikan masa depan dalam lingkup nasional (FTK : 2018, 25).

Dari visi di atas, kemudian dikembangkan profil lulusan. Profil lulusan PBA UIN Syarif Hidayatullah dibagi kepada dua, yaitu profil utama dan profil tambahan. Profil utamanya adalah “pendidik Bahasa Arab”. Adapun profil tambahan PBA UIN Syarif

Hidayatullah ada empat, yaitu: (a). Penerjemah Bahasa Arab. (b). Edupreneur bidang Pendidikan. (c). Konsultan Pendidikan Bahasa Arab. (d). Pengelola Lembaga Pendidikan.

Untuk menjadi alumni dari PBA UIN Syarif Hidayatullah, mahasiswa diwajibkan lulus atau menyelesaikan sebanyak 154 SKS. Saat ini PBA UIN Syarif Hidayatullah memiliki 16 orang dosen tetap, 7 orang bergelar doktor dan sisianya berigelar master.

3. PS PBA S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malik, Malang (UIN Maliki).

Dalam web. PBA UIN Malang disebutkan bahwa PS Pendidikan Bahasa Arab (PBA) di UIN Maliki merupakan PS yang berada di bawah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. PS PBA di fakultas resmi beroperasi berdasar SK Rektor nomor Un.3/PP.00.9/1211/2014. Sebelum adanya SK ini, PS Pendidikan Bahasa Arab berada di Fakultas Humaniora dan Budaya yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No: Dj.I/Dt.IV/1/PP.00.9/510.B/2007 tertanggal 31 Mei 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 1223 tahun 2012 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi. Akreditasi pertama dari PS ini adalah B (nilai 340) berdasarkan SK BAN PT No 036/BAN-PT/Ak-XIII/S1/I/2011, tanggal 7 Januari 2011.

Visi PBA adalah “Menjadi program studi terkemuka dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan di bidang pendidikan bahasa Arab yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan menjadi penggerak masyarakat yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional”. Dalam visi yang disebutkan di atas terlihat beberapa kandungan yaitu :

- (1). Menjadi PS terkemuka,
- (2). Menghasilkan lulusan yang kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan menjadi penggerak masyarakat
- (3). Bersaing pada tingkat nasional dan internasional.

Sebaiknya dalam visi juga disebutkan tahun visi, namun kalau tidak disebutkan, tahun pencapaian visi harus diungkap secara jelas dalam renstra, sehingga pembaca visi mengetahui kapan visi ini harus tercapai. Jika dalam visi tidak

disebutkan tahun, dan tidak pula diuraikan dalam renstra, maka visi menjadi mengambang tidak jelas.

Berdasarkan visi tersebut, kemudian PBA UIN Malang mengembangkan misi seperti berikut:

- (1). Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menghasilkan tenaga pendidik bahasa Arab di lingkungan madrasah/sekolah, pondok pesantren dan masyarakat luar sekolah
- (2). Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menghasilkan tenaga pendidik bahasa Arab di lingkungan madrasah/sekolah, pondok pesantren dan masyarakat luar sekolah.
- (3). Menyelenggarakan program penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan keilmuan program studi.
- (3) Menjalin kemitraan dengan para *stakeholder* di wilayah ASEAN dalam aspek tri dharma perguruan tinggi.

Dr. Mamluatul Hasanah, MPd mengakui bahwa visi dicapai melalui proses pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk memajukan pembelajaran KKNI di UIN Malang dirancang dengan terintegrasikan konsep Islam dengan sains dan teknologi.¹² Dr. Mamluatul Hasanah melanjutkan bahwa “Pencapaian visi misi ini juga dimudahkan karena secara institusional UIN Maliki memberikan *support* baik secara kelembagaan, program dan aktivitas akademik yang ada dalam kampus ini banyak yang berbasis bahasa Arab, atau dengan kata lain, pimpinan UIN Maliki mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap pengembangan bahasa Arab” (Hasanah: 2019).

Saat ini Sumber daya manusia (SDM) dari unsur dosen dan tenaga pendukung, menunjukkan bahwa dosen tetap prodi cukup memadai (1 orang dengan rincian 20 dosen tetap prodi, 1 *native speaker* dari Sudan, 20 dosen tetap fakultas dan 5 dosen luar biasa), baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya (tingkat pendidikan); demikian juga dengan tenaga pendukungnya. Menurut Ibu Ketua PBA UIN Maliki “Komponen kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik meliputi struktur dan isi kurikulum, kompetensi dan etika lulusan, derajat integrasi, kurikulum lokal, matakuliah pilihan dan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri di masa depan setelah lulus. Kurikulum lokal dan matakuliah pilihan disusun berdasarkan prinsip relevansi dan integrasi agar lulusannya dapat mengembangkan pilihan profesi sebagai guru yang menguasai bidang pembelajaran bahasa Arab. Aspek pembelajaran

¹² Wawancara dengan Dr. Mamluatul Hasanah, tanggal 18 Juli 2019.

meliputi perencanaan, pelaksanaan proses, dan penilaian hasil belajar (Hasanah: 2019).

4. PS PBA S1 Universitas Negeri Jakarta.

IKIP Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 1 tahun 1963. Pada dasarnya IKIP Jakarta adalah sebuah Perguruan Tinggi yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UI. Pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 093 tahun 1999, IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta. Sejak itu Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni berubah menjadi Fakultas Bahasa dan Seni. Fakultas ini memiliki dua belas Program Studi, yang salah satunya adalah Program Studi Bahasa Arab (FBS : 2015, 275). PS PBA itu sendiri dibuka sejak tahun 1967, ketika UNJ masih berstatus IKIP Negeri Jakarta.

Saat ini PBA UNJ dipimpin oleh Dr. Nuruddin, MPd. Dan telah memperoleh akreditasi A dari BAN PT, dengan SK nomor 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015, 29 Desember 2015. Adapun Visi PBA UNJ adalah : “Pada tahun 2019 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab menjadi program studi yang unggul dan menjadi pusat pengembangan ilmu bahasa Arab dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan ahli dalam bidang pendidikan bahasa Arab”.

Dalam visi ini terlihat beberapa unsur utama visi yaitu:

1. Menjadi PBA yang unggul
2. Tahun 2019
3. Pusat pengembangan ilmu Bahasa Arab dan pengabdian kepada masyarakat (yang Menghasilkan ahli dalam bidang pendidikan Bahasa Arab).

Dalam visi yang dikembangkan PBA UNJ tidak terlihat wilayah jangkauan visi, apakah tingkat Nasional, Asia Tenggara, Asia atau wilayah lain. Selain itu, dalam visi tidak terlihat distingsi PS secara jelas, yang menjadi ukuran perbedaan antara PBA ini dengan PBA di Universitas lain.

Dari visi tersebut kemudian dikembangkan misi PBA UNJ yaitu:

- (a). Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab yang cerdas dan mandiri kepada peserta didik dengan metodologi pembelajaran yang modern.
- (b). Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Arab.
- (c). Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dikembangkan kurikulum KKNI berdasarkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi nomor 15 tahun 2015. Menurut ketua PBA UNJ, dalam kurikulum yang dikembangkan di PBA UNJ, terdapat 148 SKS yang terbagi kepada MKU, MKDK dan MK PS dibagi dua yaitu MK Wajib dan MK pilihan. Pemilihan MK berdasarkan peminatan PS yaitu (a). Terjemah Arab/Indonesia dan Indonesia/Arab, (b). Agama Islam. MK Pilihan terdiri dari 12 SKS dengan kewajiban Mahasiswa memilih 4 SKS. Pembelajaran disuh oleh 21 orang dosen dengan 14 orang bergelar doktor dan 7 orang bergelar master.

Sebenarnya menurut ukuran BAN PT, sebaiknya jumlah MK pilihan pada suatu PS adalah sebanyak sekurang-kurang 18 SKS dan mahasiswa diwajibkan memilih 9 SKS.

Pelaksanaan pembelajaran di UNJ dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang lengkap yaitu lab. bahasa, dan lab. multimedia. Lab ini digunakan secara maksimal, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam mencapai target belajarnya.

5. PS PBA S1 Universitas Negeri Malang

Jurusan Sastra Arab (JSA) awalnya merupakan Seksi Bahasa Arab. Seksi ini dibuka tahun 1965 dan merupakan bagian dari Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS). Sebelum itu, ada 2 seksi lainnya, yaitu Seksi Bahasa Inggris dan Seksi Bahasa Jerman. Selanjutnya, pada tahun 1966, seksi Bahasa Arab berubah menjadi Jurusan Bahasa Arab. Kemudian pada tahun 1975, Jurusan Bahasa Arab berubah namanya menjadi Departemen Bahasa Arab. Ketika terjadi perubahan sistem pada seluruh LPTK dari program sarjana (lama) menjadi S1 pada tahun 1978/1979, Departemen Bahasa Arab juga membuka program S1 dengan masa studi 4 tahun atau 8 semester.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 0714/0/1983 tentang jenis jurusan dan fakultas di lingkungan Universitas dan IKIP Negeri se Indonesia, Departemen Bahasa Arab berubah namanya menjadi Jurusan Pendidikan Bahasa Asing (JPBA)., sedangkan FKSS berubah menjadi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS). SK Mendikbud tersebut ditindaklanjuti SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 107/Dikti/Kep/1984 tentang jenis dan jumlah program studi di setiap jurusan pada fakultas di lingkungan IKIP MALANG. Berdasarkan SK itulah, JPBA IKIP MALANG memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PSPBA).

Sesuai dengan SK Dirjen DIKTI Nomor 143/DIKTI/Kep/2000 tentang jenis dan jumlah jurusan di lingkungan UM seiring dengan perubahan FPBS menjadi Fakultas Sastra (FS), JPBA berubah menjadi Jurusan Sastra Arab (JSA). Kemudian pada tahun 2000 juga, dengan SK Rektor No. 0381/KEP/ PT28.H/C/2000, ditetapkan bahwa program studi yang berada di JSA adalah Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Arab (S1), dan PS PBA (S2).

Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Arab (S1) telah mengikuti 4 kali program akreditasi program studi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pada akreditasi yang pertama (tahun 1996) dan kedua (tahun 2003), diperoleh nilai B. Pada akreditasi yang ketiga (tahun 2009), diperoleh nilai A, dan nilai A ini tetap dipertahankan pada akreditasi yang keempat (tahun 2014) sesuai SK BANPT Nomor: 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 dan berlaku sampai tanggal 10 September 2019.

Visi dari PBA Universitas Negeri Malang adalah “Menjadi program studi sarjana unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi bidang pendidikan bahasa Arab”¹³. Dalam visi ini terdapat beberapa ungkapan yang jelas yaitu:

- (1). PS yang unggul dan menjadi rujukan
- (2). Penyelenggaraan tri dharma PT bidang bahasa Arab.

Jika pada pada visi dari PS lain terdapat tahun, wilayah jangkauan dan distingsi PS, maka visi PS PBA Universitas Negeri Malang dibuat ringkas tanpa menyebutkan tahun dan wilayah, sehingga ukuran ketercapaian visi menjadi susah dinilai.

Dari visi tersebut, kemudian dirancang misinya, yaitu :

- (a). Menyelenggarakan pendidikan bahasa Arab yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi;
- (b). Menyelenggarakan penelitian bidang pendidikan bahasa Arab yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat;
- (c). Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan bahasa Arab yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
- serta (d). Menyelenggarakan tatapamong program

¹³ Web PBA Universitas Negeri Malang. <http://arab.sastra.um.ac.id/program-studi-sarjana-pendidikan-bahasa-arab/>

studi sarjana pendidikan bahasa Arab yang akuntabel dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.¹⁴

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kemudian pengelola PBA Universitas Negeri Malang mengembangkan profil PS sebagai dasar pengembangan kurikulum. Kurikulum PS PBA PBA Universitas Negeri Malang berisi 146 SKS, yang diasuh oleh 19 orang dosen, dengan 12 orang bergelar doktor dan sisanya masih bergelar master.

II. Standar Kurikulum PBA yang dikembangkan IMLA (Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-Arabiyah) Untuk PBA dan PBSA di Indonesia.

IMLA adalah organisasi propesi yang dibentuk oleh perkumpulan PS PBA dan PBSA dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang dirintis pada tanggal 9 Desember tahun 1998 dalam pertemuan yang diadakan di Universitas Negeri Malang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh utusan dari Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Fakultas Sastra UGM Yogyakarta. Kemudian ide tersebut dibahas kembali dalam pertemuan selanjutnya yang diadakan di UGM Yogyakarta pada tanggal 25 April 1999, dan dihadiri oleh delapan perguruan tinggi dari lima kota besar di Pulau Jawa, yaitu UGM, IAIN Sunan Kalijaga, Universitas Negeri Malang, Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, IAIN Sunan Gunungjati, dan IAIN Sunan Ampel. Dalam pertemuan ini dihasilkan rancangan AD/ART organisasi, dan disepakati penyelenggaraan Muktamar I di Jawa Timur pada bulan September 1999 (Asrari: 2019).

Muktamar IMLA pertama diadakan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1420 H bertepatan dengan 25 September 1999, di Hotel Air Panas Songgoriti, Batu, Malang, dan dihadiri oleh 120 peserta yang merupakan utusan dari 46 perguruan tinggi. Di dalam muktamar inilah secara resmi dideklarasikan berdirinya Ittihadil Mudarrisin Lil-Lughah Al-Arabiyah disingkat IMLA. Tujuan utama penubuhan IMLA adalah untuk membantu peningkatan kualitas pembeajaran Bahasa Arab di Indonesia, termasuk membantu pengembangan kurikulum.

Sehubungan dengan pengembangan kurikulum ini, IMLA secara langsung membantu PS PBA dan PBSA dengan menelaah kurikulum yang ada dan merumuskan dasar-dasar dari profil dan SKL PS.

¹⁴ Web PBA Universitas . . . <http://arab.sastra.um.ac.id/program-studi-sarjana-pendidikan-bahasa-arab/>

Dalam standar kurikulum yang dikembangkan IMLA diuraikan bahwa bahwa kurikulum KKNI lebih ditekankan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Hal ini terlihat dari beberapa indikator baik secara de jure maupun secara de facto (Asrari, 2018, 7). Secara de jure SNPT menuntut PS merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran (Asrari: 2019). Secara khusus untuk Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama penyusunan kurikulum KKNI mengacu KMA No. 15 tahun 2018, pasal 7 ayat 2 yang menggaris bawahi kriteria minimal profil lulusan, deskripsi kualifikasi, dan deskripsi CPL. Jika merujuk kepada aturan ini maka semua PS yang telah terlebih dahulu mengembangkan Kurikulum KKNI sebelum turunnya aturan ini, maka PS tersebut harus menyesuaikannya.

Untuk membantu PS PBA dan PBSA dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan aturan KKNI, maka IMLA membuat rumusan yang dapat digunakan secara bersama tentang profil PS.

Profil PS yang dikembangkan oleh IMLA dapat di amati dalam buku Standar Kurikulum PBA dan PBSA, yang merupakan hasil lokakarya nasional IMLA yang diadakan di Bandung pada 7 Februari 2019, seperti berikut :

Tabel III
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

JENIS	PBA	DESKRIPSI PROFIL
Profil Utama	Pendidik dan pengajar bidang studi bahasa Arab	a. Memiliki kompetensi professional sebagai pendidik dan pengajar Bahasa Arab pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah. b. Memiliki kompetensi keilmuan di bidang bahasa, sastra dan budaya Arab. c. Memiliki kompetensi komunikatif dalam bahasa Arab tingkat lanjut.
Profil Tambahan	Praktisi/ pelaku usaha berbasis keahlian bahasa Arab	Memiliki kompetensi tambahan pada salah satu bidang usaha jasa berikut: a. Penerjemahan Arab-Indonesia dan sebaliknya b. Kaligrafi Arab c. Bahasa Arab untuk anak (Bauna) d. Pengembangan Teknologi pembelajaran bahasa Arab e. Bahasa Arab untuk tujuan khusus (pariwisata, haji, media masa) f. Bahasa Indonesia penutur Arab (BIPAR)

Sebenarnya profil yang dikembangkan oleh IMLA masih merupakan profil dasar umum dari PS PBA/PBSA, yang masih perlu dikembangkan menjadi profil yang lebih spesifik. Pada Profil tambahan, IMLA hanya menyebutkan “sebagai praktisi dan pelaku usaha”. Secara lebih spesifik, sebenarnya profil suatu PS dapat berbentuk suatu model keahlian spesifik, misalnya menjadi ahli dalam pengembangan multimedia Bahasa Arab, atau penerjemah Bahasa Arab. Karena itu sebenarnya prodi mesti juga mengembangkan profil, sesuai dengan kondisi yang mereka miliki.

Setelah adanya profil, PS perlu mengembangkan CPL sesuai dengan kebutuhan profil. Dari sini, harus dipahami bahwa jika PS mengembangkan suatu profil, maka mereka harus siap untuk mengembangkan CPL sesuai dengan kebutuhan profil.

Sesuai dengan profil yang dikembangkan oleh IMLA, kemudian IMLA juga menentukan CPL yang merujuk dari SNPT 2015. CPL yang diuraikan dalam buku Standar Kurikulum PS PBA dan PBSA, sesuai dengan SNPT terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu berkaitan dengan : (a). Sikap dan Tata nilai, (b). Ketrampilan Umum, (c). Ketrampilan Khusus, dan (d). Penguasaan Pengetahuan. Uraian ini dapat menjadi petunjuk dasar bagi PBA dan PBSA dalam mengembangkan CPL, jika mereka belum mampu mengembangkan secara mandiri. Secara lebih lengkap CPL yang dikembangkan oleh pengurus pusat IMLA dapat diamati dalam tabel berikut :

Tabel IV
1. Sikap dan Tata Nilai

KODE	RUMUSAN CP (DIAMBIL DARI SNPT 2015)
S1	a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
S2	b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S3	c. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S4	d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
S5	e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
S6	f. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat

	berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S7	g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S8	h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S9	i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
S10	j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

Tabel V
2. Ketrampilan Umum

KODE	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (DARI SNPT 2015)
KU1	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KU2	b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
KU3	c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KU4	d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KU5	e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

KU6	f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
KU7	g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
KU8	h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
KU9	i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
KU10	j. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok
KU11	k. Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Tabel VI
3. Keterampilan Khusus

KODE	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
KK1	a. Mampu berbahasa Arab lisan tingkat lanjut baik reseptif maupun produktif dalam bentuk komunikasi dengan penutur asli, memahami isi berita radio/TV, presentasi satu arah, dan multi arah melalui pembelajaran berbasis tugas, proyek, dan simulasi.
KK2	b. Mampu berbahasa Arab tulis tingkat lanjut secara reseptif dalam bentuk: memahami referensi ilmiah dan populer kebahasaan, kesastraan, kependidikan, dan secara produktif dalam bentuk menulis surat resmi dan karya ilmiah.

KK3*	c. 1) Mampu menyusun perencanaan dan perangkat pembelajaran bahasa Arab di sekolah/madrasah, memecahkan masalah yang timbul, serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi sesuai dengan perkembangan IPTEKS.
	2) Mampu melaksanakan analisis kebahasaan Arab dengan menerapkan konsep-konsep teoretis dan aspek -aspek aliran kebahasaan yang berkembang di Barat ataupun khusus dalam konteks bahasa Arab.
KK4*	d 1) Mampu melaksanakan pembelajaran bahasa Arab di sekolah/madrasah, memecahkan masalah yang timbul, serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dengan memanfaatkan perkembangan IPTEKS mutakhir.
	2) Mampu melaksanakan analisis kesastraan Arab dengan menerapkan konsep-konsep teoretis dan aspek-aspek aliran kesastraan yang berkembang di barat ataupun khusus dalam konteks Kesastraan Arab.
KK5*	e 1) Mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran bahasa Arab, memecahkan masalah, dan beradaptasi terhadap situasi dengan memanfaatkan perkembangan IPTEKS.
	2) Mampu melaksanakan apresiasi dan kritik terhadap karya sastra Arab (prosa, puisi, drama, dan sastra terjemahan)
KK6	f. Mampu mengaplikasikan keahlian tambahan sebagai praktisi/wirausahawan yang berbasis pada keahlian berbahasa Arab misalnya: praktisi kaligrafi, penerjemah, computer-internet, dan pendidikan masyarakat.

Catatan: bertanda bintang, butir no. 1 untuk Prodi PBA dan no. 2 untuk Prodi BSA

Tabel VII
4. Penguasaan Pengetahuan

KODE	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
PP1	a. Mampu menguasai konsep-konsep teoretis ilmu bahasa secara umum ataupun dalam kaitannya dengan ilmu bahasa Arab, utamanya konsep-konsep linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik melalui

	pembelajaran berbasis pada mahasiswa.
PP2	b. Mampu menguasai konsep-konsep teoretis kesastraan Arab, dan menikmati karya sastra Arab, dan menguasai dasar-dasar kebudayaan Arab secara umum.
PP3	c. Mampu menguasai konsep-konsep teoretis ilmu kebahasaan Arab secara mendalam utamanya, gramatika (<i>nahwu-sharaf</i>) dan system tulisan (<i>khat-impla'</i>).
PP4*	d. 1) Mampu menguasai konsep-konsep teoretis tentang komponen-komponen pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing yang mencakup: tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
	2) Mampu menguasai konsep-konsep teoretis dan aspek-aspek aliran kebahasaan yang berkembang di Barat ataupun khusus dalam konteks bahasa Arab.
KODE	RUMUSAN CP (DIAMBIL DARI SNPT 2015)
PP5*	e. 1) Mampu menguasai konsep-konsep teoretis tentang perencanaan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing yang mencakup: kurikulum, silabus, dan RPP melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
	2) Mampu menguasai konsep-konsep teoretis dan aspek-aspek aliran kesastraan yang berkembang di Barat ataupun khusus dalam konteks Kesastraan Arab.
PP6*	f. 1) Mampu menguasai konsep-konsep teoretis pengelolaan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing mencakup: pengelolaan kelas, model pembelajaran (individual, kelompok, dan klasikal), melalui pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
	2) Mampu menguasai konsep-konsep teoretis kajian dan kritik sastra secara umum ataupun khusus dalam konteks sastra Arab (prosa, puisi, drama, sastra terjemahan).
PP7	g. Mampu menguasai konsep-konsep teoretis salah satu keahlian tambahan bahasa Arab, misalnya: a) kaligrafi, b) penerjemahan, c) PAIGAMASY (pendidikan agama Islam untuk keluarga dan

	masyarakat), d) BAUNA (bahasa Arab untuk anak), dan e) TIKARA (teknologi informasi dan komunikasi Arab).
PP8*	h. 1) Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah bidang pendidikan bahasa Arab berbentuk laporan penelitian berbasis kelas.
	2) Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah bidang kajian bahasa dan sastra Arab berbentuk laporan penelitian berbasis teks.
PP9	i. Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah penguasaan pengetahuan dan ketrampilan bahasa Arab berbentuk laporan penelitian kebahasaan Arab.
PP10	j. Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah di bidang kewirausahaan berbasis keahlian bahasa Arab dalam bentuk laporan penelitian.

Catatan: bertanda bintang, no. 1 untuk Prodi PBA dan no. 2 untuk Prodi BSA

Dari CPL yang dikembangkan terlihat bahwa CPL tersebut masih bersifat umum dan untuk keahlian-keahlian tertentu PS PBA/PBSA masih perlu mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan.

III. Pola pengembangan Kurikulum Pada Pada Prodi PBA Unggulan

Dalam penelitian yang dilakukan pada lima Program Studi PBA yang menjadi subjek penelitian ini, peneliti menemukan data seperti berikut :

1. Penyusunan Kurikulum KKNI pada PBA UIN Ar-Raniry.

Kurikulum PBA UIN Ar-Raniry, telah ada sejak lahirnya Program studi pendidikan Bahasa Arab di UIN Ar-Raniry. Sebelum diadakan penyusunan kurikulum KKNI, kurikulum PBA UIN Ar-Raniry disusun berdasarkan SK Menteri Agama RI no. 353/2004 tentang pedoman penyusunan kurikulum. Usaha pembahasan kurikulum KKNI di PBA UIN Ar-Raniry baru dilakukan pada tahun 2018. Kemudian untuk menyempurnakan kurikulum KKNI, PBA UIN Ar-Raniry kembali mengevaluasi kurikulum yang berlaku, yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Program studi. Mereka yang ditunjuk adalah para dosen senior yang mengampu MK program Studi.

Pola pembahasan kurikulum KKNI terakhir dilakukan oleh PBA UIN Ar-Raniry dilakukan setelah penunjukan tim penyusun Kurikulum KKNI, di mana Fakultas Tarbiyah mengadakan workshop kurikulum KKNI untuk semua program studi yang berada di Fakultas Tarbiyah pada tanggal 20 Oktober 2018. Melalui workshop tersebut para dosen kembali dilatih untuk mendalami kurikulum KKNI, yang diharapkan semua program studi menghasilkan kurikulum KKNI secara sempurna. Dalam workshop tersebut program studi Pendidikan Bahasa Arab diwakili oleh Dr. Ismail Muhammad, MA, Drs. Usman Husein, MAg, Dra. Salma Hayati, MA, dan Dara Mubshirah, MA, yang didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi PBA. Mereka ini merancang dasar kurikulum. Selanjutnya Program Studi mengundang semua dosen dosen pengampu MK di program studi, untuk memahami dan mendalami langkah-langkah penyusunan kurikulum KKNI, serta membahas aspek-aspek yang berhubungan dengan MK yang diasuh (Muslim, 2019).

Sebagai mana dalam teori pengembangan kurikulum KKNI yang telah dibahas terdahulu, aspek awal yang dibahas adalah pengembangan dan pengenalan terhadap visi dan misi PBA UIN Ar-Raniry, yang dilanjutkan dengan pembahasan Profil alumni. Dari profil alumni kemudian digagas pengembangan CPL. Dalam membahas profil alumni PBA UIN Ar-Raniry digagas distingsi program studi Bahasa Arab UIN Ar-Raniry, yang melahirkan profil Asisten Peneliti Pendidikan, Pengembang Bahan Ajar dan Penterjemah/Arabicprenur. Ketiga distingsi ini kemudian mempunyai CPL tersendiri, yang kemudian melahirkan MK pilihan pada PBA.

Sebagai peneliti dan partisipan dalam pengembangan kurikulum KKNI di PS PBA UIN Ar-Raniry, peneliti menemukan kendala pengembangan kurikulum KKNI di PBA UIN Ar-Raniry adalah tidak semua dosen hadir ketika diundang untuk pembahasan CPL dan penentuan BK, padahal pengembangan CPL dan penentuan BK adalah bagian yang menentukan dalam pengembangan kurikulum KKNI, di mana kehadiran para dosen diharapkan dapat memberi informasi dan membantu dalam menentukan CPL dan BK yang berhubungan dengan keahlian masing-masing dosen. Ketika dosen tidak hadir, maka keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan CPL dan BK menjadi kurang lengkap.

Namun demikian untuk pengembangan awal dari CPL, PBAUIN Ar-Raniry berpedoman kepada petunjuk SNPT, dan pengembangan selanjutnya yang lebih terperinci, pembahasan CPL harus dibahas secara lanjut dalam rapat internal dosen,

yang mampu MK. Dalam pembahasan tentang CPL dan hubungannya dengan BK (Bahan Kajian), PBA UIN Ar-Raniry terkendala dengan kurangnya kehadiran dosen dalam rapat pembahasan kurikulum. Kendala ini kemudian diatasi untuk sementara waktu dengan tidak membahas CPL secara bebas, tetapi lebih kepada menyesuaikan CPL dan BK yang ada dengan MK yang sudah ada dalam struktur kurikulum sebelumnya. Ini bermakna kurikulum KKNI di PBA UIN Ar-Raniry belum dilaksanakan secara maksimal, tetapi masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan.

Dari hasil pembahasan, kurikulum KKNI PBA UIN Ar-Raniry memilih untuk mengembangkan kurikulum dengan menggunakan struktur kurikulum model serial, dimana beberapa MK yang dikembangkan berbentuk serial, misalnya MK Muthalaah I s/d IV, MK Muhadatsah I s/d IV, Insyak I s/d IV, Nahwu I s/d IV, Sharaf I s/d IV. Selain itu terdapat beberapa MK yang menjadi prasyarat MK selanjutnya seperti MK Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran, Perencanaan Pembelajaran menjadi syarat MK sebelum pelaksanaan PPL, dan MK Metode Pembelajaran menjadi MK prasyarat penulisan Tugas Akhir. Dari hasil pembahasan tersebut kemudian melahirkan struktur kurikulum yang terdistribusi dalam delapan semester seperti yang dapat diamati dalam lampiran 1, dari sajian laporan penelitian ini.

2. Penyusunan Kurikulum KKNI pada PBA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menurut Ketua PS PBA UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Zainal Muttaqin, MA, penggunaan kurikulum KKNI di UIN Syarif Hidayatullah telah mulai dibahas sejak tahun 2015, setahun setelah lahirnya Pemendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI. Namun demikian pembahasan kurikulum KKNI di PBA UIN Syarif Hidayatullah masih terus dalam penyempurnaan. Dalam pembahasan kurikulum KKNI, PBA UIN Syarif Hidayatullah berpegang pada aturan enam tahapan kurikulum KKNI yang dirumuskan Dikti, yaitu : (1). Penetapan Profil Lulusan. (2). Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (3). Penetapan Bahan Kajian. (4). Penentuan Mata Kuliah. (5). Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah. (6). Penyusunan Struktur Kurikulum. (7). Proses Pembelajaran. (8). Penilaian. (9). (Muttaqin, 2019). Namun demikian sampai saat ini pembahasan kurikulum KKNI di PBA Syarif Hidayatullah belum dilaksanakan secara tuntas, misalnya tentang pembahasan peminaan PS yang sampai sekarang masih belum ada kesepakatan di antara para pembahas kurikulum (Muttaqin, 2019). Selanjutnya Zainal Muttaqin

mengatakan bahwa pada PBA UIN Jakarta tidak dibentuk secara khusus unit pembahas kurikulum, dan tim pembahas kurikulum PBA hanya dibentuk secara insidental, sesuai kebutuhan dan pembahasan kurikulum itu sendiri (juga) dilakukan secara insidental. Walaupun demikian, pada dasarnya evaluasi kurikulum direncanakan secara reguler, untuk menemukan aspek kekurangan yang perlu perbaikan. Di sisi lain, seorang pakar pendidikan yang juga dosen PBA UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Abdul Aziz Fakhurrozi, MA, mengakui bahwa PS PBA UIN Syarif Hidayatullah sering dihubungi oleh PS PBA jika memerlukan bantuan, termasuk dalam perbaikan kurikulum (Fakhurrozi: 2019).

Walaupun masih dalam tahap penyempurnaan kurikulum di PS PBA UIN Syarif Hidayatullah telah berusaha menggunakan pola kurikulum KKNi dengan mengikuti langkah-langkah pembahasan yang sistematis. Seperti yang telah diutarakan pada bagian sebelumnya, PBA UIN Syarif Hidayatullah, telah menetapkan Visi/Misi PS, dan Profil PS. Selain itu pembahasan kurikulum KKNi juga telah membahas secara tuntas tentang CPL, sampai kepada penetapan MK yang menjadi objek kajian mahasiswa PS PBA. Namun demikian, seperti telah dikemukakan sebelumnya PBA UIN Syarif Hidayatullah belum menetapkan MK pilihan berdasarkan peminatan PS. Dari pengamatan terhadap struktur kurikulum PBA UIN Syarif Hidayatullah, peneliti tidak menemukan perbedaan yang jauh antara kurikulum yang dipakai sekarang dengan kurikulum yang dipakai sebelumnya, kecuali hanya muatan MK yang berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran, yang menurut Dr. Zainal Muttaqin, mulai mengarah kepada penggunaan multimedia.

Struktur kurikulum PBA UIN Syarif Hidayatullah terdiri dari berbagai MK yang terakumulasi sebanyak 154 SKS, yang secara keseluruhan dapat diamati dalam lampiran dua dari laporan penelitian ini.

3. Penyusunan Kurikulum KKNi pada PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki).

PS PBA UIN Malik Ibrahim Malang dianggap sebagai PS PBA terbaik yang ada di Indonesia, saat ini dipimpin oleh Ibu Mamluatul Hasanah. PBA UIN UIN Maliki, telah mulai membahas kurikulum KKNi sejak tahun 2015/16 (Nurhadi: 2017, 225).

Sesuai dengan SOP yang digariskan oleh LPM UIN Malik Ibrahim UIN Maliki im, kurikulum suatu PS di lingkungan UIN Malik Ibrahim harus direview paling kurang sekali setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan secara reguler bersamaan dengan acara

bimbingan teknis yang dilakukan PS, yang diikuti oleh semua SDM yang dimiliki, yaitu 20 dosen tetap prodi, 1 *native speaker* dari Sudan, 20 dosen tetap fakultas dan 5 dosen luar biasa. Dalam acara tahunan tersebut dibahas segala masalah yang dihadapi PS, termasuk masalah kurikulum. Tim pembahas kurikulum secara khusus baru akan dibentuk, jika dibutuhkan perubahan kurikulum secara besar, seperti perubahan kurikulum menjadi format KKNI. Jika pembahasan kurikulum hanya menyangkut suatu masalah kecil, misalnya tentang tindak lanjut permasalahan yang diperoleh dari mahasiswa, maka diselesaikan secara cepat oleh pengelola PS (Mubaligh: 2019).

Pembahasan kurikulum KKNI di PBA UIN UIN Maliki, dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap *pertama* (pra penyusunan) mencakup mendatangkan nara sumber ahli kurikulum, dan temu ramah dengan stakeholder dan pembentukan tim perumus, tahap *kedua* (tahap penyusunan), yang mencakup perumusan profil, CPL, pemetaan bahasa kajian, penetapan MK, SKS, sebaran MK dan penyusunan RPS, serta tahap *ketiga* (uji publik), yang mencakup presentasi di diktis pusat, presentasi di forum universitas (Nurhadi: 2017, 225-226). Sampai saat ini dianggap telah mencapai target yang diinginkan PS, yaitu sampai lahirnya kurikulum KKNI yang baik, yang dilengkapi dengan peminatan pada PS. Saat ini PBA UIN Maliki, telah menetapkan empat peminatan yang diterapkan kepada mahasiswa yaitu Pembelajaran Bahasa Arab pada anak-anak, Terjemahan Bahasa Arab untuk penutur asing, jurnalistik berbahasa Arab, dan keahlian multi media Bahasa Arab. Setiap peminatan yang dipilih, mahasiswa diwajibkan mengikuti 6 sks MK sesuai dengan peminatan pilihan. Untuk itu secara akumulatif jumlah MK pilihan pada PBA UIN Malik Ibrahim Malang adalah 24 sks. Menurut Ibu Ketua PBA UIN Maliki “Pemilihan peminatan ini dianggap sebagai bagian dari kurikulum lokal dan MK pilihan disusun berdasarkan prinsip relevansi dan integrasi agar lulusannya dapat mengembangkan pilihan profesi sebagai guru yang menguasai bidang pembelajaran bahasa Arab” (Hasanah, 2019). Selanjutnya Ibu ketua PS juga menjelaskan bahwa komponen kurikulum PBA UIN Maliki, dilengkapi dengan pelaksanaan pembelajaran, dan suasana akademik yang mencakup struktur dan isi kurikulum, kompetensi dan etika lulusan, derajat integrasi, kurikulum lokal, mata kuliah pilihan. Faktor utama dari keberhasilan pembahasan kurikulum di UIN Malik Ibrahim adalah adanya komitmen pimpinan dan dosen, serta tersedianya dokumen yang diperlukan. (Nurhadi: 2017, 225).

Mamluatul Hasanah menuturkan bahwa kurikulum KKNi di UIN Maliki diberi tajuk KKNi integrasi dan Ulul Albab, yang aplikasinya diterapkan melalui pelaksanaan program mukim di ma'had dengan kewajiban penerapan bahasa Arab yang terpantau (Hasanah, 2019).

4. Penyusunan Kurikulum KKNi pada PBA Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Universitas Negeri Jakarta adalah Universitas yang bermetamorfosis dari IKIP Jakarta. IKIP Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 1 tahun 1963, yang sebenarnya merupakan Perguruan Tinggi yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UI dan kemudian berubah menjadi UNJ, pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 093 tahun 1999. Sejak itu Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni berubah menjadi Fakultas Bahasa dan Seni, yang memiliki dua belas Program Studi, yang salah satunya adalah Program Studi Bahasa Arab (FBS : 2015, 275). PS PBA itu sendiri dibuka sejak tahun 1967, ketika UNJ masih berstatus IKIP Negeri Jakarta.

Saat ini, pelaksanaan pembelajaran di PS PBA UNJ diampu oleh 21 orang dosen yang terdiri dari 14 orang bergelar doktor dan 7 orang bergelar 7 orang. Jika dilihat dari jumlah dosen yang dipersyaratkan pada aturan BAN-PT, jumlah dosen di PS ini jauh berada di atas batas minimal (6 orang).

Pada dasarnya pengembangan dan review kurikulum di UNJ dilakukan dengan mengikuti panduan khusus pengembangan kurikulum yang dikeluarkan LP3M UNJ. Adapun peninjauan kurikulum itu sendiri dilakukan secara reguler setiap dua tahun sekali, atau jika terdapat aturan baru tentang kurikulum. Hal yang sama dilakukan sehubungan dengan keluarnya aturan tentang kurikulum KKNi yang pembahasannya dimulai sejak tahun 2015.

Pembahasan kurikulum KKNi dimulai dengan mengadakan pelatihan kurikulum KKNi yang dilakukan universitas dengan mengundang nara sumber dari DIKTI yaitu Dr. Toto Bintoro, MA. Dalam pelaksanaan pelatihan dan pengenalan awal kurikulum KKNi ini, pada dosen PS tidak hanya belajar teori kurikulum, tetapi juga belajar bagaimana cara pengembangan kurikulum KKNi di PS. Dari aspek ini, pengembangan kurikulum KKNi di PBA UNJ tidak mempunyai kendala secara berarti, karena secara umum dosen UNJ memahami kurikulum KKNi.

Untuk memudahkan pengembangan kurikulum di UNJ LP3M mengembangkan templet kurikulum yang terdiri dari berbagai CPL. PS PBA (dan juga

PS lain) hanya mengembangkan CPL untuk penguatan materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan PS. Adapun CPL yang berhubungan dengan ilmu tingkat universitas dan fakultas dikembangkan oleh timnya sendiri.

Para pimpinan dan dosen PBA UNJ sepakat untuk menggunakan format kurikulum serial. Hal ini terjadi karena pada dasarnya MK yang dirancang dalam pembelajaran Bahasa Arab di UNJ, terutama untuk MK ketrampilan adalah MK yang berbentuk serial, misalnya Muhadatsah I - IV, Nahwu I - VI dll. Secara lebih jelas, struktur kurikulum yang digunakan di PBA UNJ disajikan dalam lampiran 3 dari laporan ini yang dikutip dari buku pedoman yang dikeluarkan Fakultas Bahasa dan Sastra UNJ

5. Penyusunan Kurikulum KKNI pada PBA Universitas Negeri Malang

Universitas Negeri Malang yang diringkas dengan sebutan UM merupakan perguruan yang bermetamorfosis dari IKIP Malang, mengikuti SK Dirjen DIKTI Nomor 143/DIKTI/Kep/2000. Kemudian pada tahun 2000 juga, dengan SK Rektor No. 0381/KEP/ PT28.H/C/2000, ditetapkan bahwa program studi yang berada di JSA adalah Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Arab (S1), dan PS PBA (S2) (Hanik, 2018). Pada akreditasi yang ketiga (tahun 2009), PBA UM memperoleh nilai A, yang kemudian dipertahankan pada akreditasi yang keempat (tahun 2014) sesuai SK BAN-PT Nomor: 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 dan berlaku sampai tanggal 10 September 2019.

Pelaksanaan perkuliahan di PBA UM mempunyai fasilitas yang mencukupi yang dilengkapi dengan laboratorium bahasa, laboratorium multimedia dan *markaz taallum al-din*.

Rencana pengembangan kurikulum di PBAUM dilakukan dengan perencanaan insidental, atau jika dibutuhkan. Artinya penyempurnaan kurikulum tidak dilakukan dengan rencana yang reguler, tetapi hanya dilakukan jika adanya aturan baru, atau adanya laporan tentang perlunya perbaikan (Hanik: 2019). Adapun tentang pengembangan kurikulum KKNI, PBA UM melakukannya dengan mengikuti aturan-aturan dengan tahapan yang jelas yaitu : (1). Penetapan Profil Lulusan. (2). Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (3). Penetapan Bahan Kajian. (4). Penentuan Mata Kuliah. (5). Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah. (6). Penyusunan Struktur Kurikulum. (7). Proses Pembelajaran. (8). Penilaian. (9). Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester yang dikeluarkan Dikti.

Ketua PS PBA UM menegaskan bahwa, PS PBA UM tidak terlalu membahas MK secara khusus dalam pembahasan kurikulum KKNI, karena sajian struktur kurikulum yang sudah ada, oleh para pakar internal dianggap masih cukup baik untuk mencapai CPL PS PBA. Untuk itu PBA UM hanya berusaha untuk menyesuaikan MK yang ada dengan format kurikulum KKNI, dan hanya menyusun MK paket peminatan sebagai distingsi khusus PBA UM.

Pengembangan kurikulum di PBA UM bukan merupakan hal yang rumit, karena di PBA UM secara internal terdapat profesor ahli dalam bidang kurikulum dan Bahasa Arab, yaitu Prof. Muhammad Ainin, Prof Imam Asrari, Prof. Muhaiban dan pakar Bahasa Arab Indonesia Ust. Ahmad Fuad Efendi. Mereka adalah para pimpinan IMLA Indonesia yang menjadi pembinan PS PBA dan PBSA di seluruh Indonesia.

Kurikulum PBA UM disusun pembagian CPL yang kemudian melahirkan MK ke dalam beberapa kelompok yang dapat diamati dalam tabel berikut:

Tabel VIII
Kelompok MK PBA UM

No	Jenis MK	Sks
1.	Pengembangan Mepribadian (MPK)	8
2.	Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)	12
3.	Keahlian Berkarya (MKB)	117
4.	Prilaku Berkarya (MPB)	6
5.	Kehidupan Bermasyarakat	8
Jumlah		151

Paket keahlian adalah sebutan lain dari paket peminatan yang merupakan distingsi PS yang dikembangkan secara khusus oleh PS PBA UM. Paket keahlian ini dimasukkan sebagai bagian dari MK Keahlian Berkarya, paket ini digolongkan ke dalam beberapa bentuk yaitu: (a). Penerjemahan, (b). Pendidikan Agama Islam, (c). Kaligrafi, (d). Bahasa Arab untuk Anak (Al-Arabiyah Li Al-Athfal), (e). Komputer dan Internet, (f). MK untuk tujuan Khusus.

Setiap paket menyediakan MK sebanyak 12 sks yang wajib dipilih oleh mahasiswa. Mereka diwajibkan memilih satu paket secara konsisten dan tidak boleh memilih MK lain yang di luar paket pilihan.

Struktur kurikulum PBA UM diuraikan ke dalam MK per semester dengan menggunakan model serial. Adapun struktur kurikulum secara lengkap dapat diamati dalam lampiran 4 dari laporan ini.

Selain MK yang disajikan dalam strukture kurikulum di atas, istimewa dari PBA UM adalah adanya paket peminatan yang banyak seperti yang diurai di atas. Adapun MK lengkap dari peminatan tersebut dapat di amti dalam tabel berikut :

Tabel IX
Struktur MK Paket Peminatan PBA UM

Paket Penerjemahan		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Teknik Penerjemahan	2
2	Latihan Penerjemahan	4
3	Tugas Akhir Penerjemahan	4
4	Kewirausahaan Penerjemahan	2
Total		21
Paket Pendidikan Agama Islam		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Akidah Akhlak	2
2	Fikih	2
3	Tafsir dan Hadits	2
4	Metodologi PAI	2
5	Pembelajaran BA Qurani	2
6	Kewirausahaan PAI	2
Total		12
Paket Kaligrafi		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Khat Naskhi Riq'i	3
2	Khat Tsuluts dan Diwani	3
3	Khat Kufi dan Faris	2
4	Ragam Teknik Seni Rupa Khat Arab	2
5	Kewirausahaan Kaligrafi	2
11	Pengantar Filsafat Ilmu	2
Total		12
Bahasa Arab untuk Anak (Al-Arabiyyah Li Al-Athfal)		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Pembelajaran Baca-tulis Huruf Arab	2
2	Strategi Pembelajaran ALA	2
3	Psikologi Anak	2
4	Pengembangan Materi ALA	2
5	Pengembangan Media ALA	2
6	Kewirausahaan ALA	2
Total		12
Komputer dan Internet		

Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Desain Grafis	2
2	Multimedia	2
3	Internet	2
4	Produksi Multi Media PBA	4
5	Kewirausahaan Komputer dan Internet	2
Total		12
Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus		
1	Bahasa Arab untuk Haji dan Umrah	2
2	Bahasa Arab untuk Penerjemah Lisan	2
3	Bahasa Arab Media Masa	2
4	Bahasa Arab Pariwisata	2
5	Bahasa Arab Dunia Usaha	2
6	Kewirausahaan Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus	2
Total		12

Struktur kurikulum PBA UM yang dilengkapi dengan strukture MK paket peminatan, terlihat mempunyai ciri yang berbeda dibandingkan strukture kurikulum PBA lain yang ada di Indonesia. Karakteristik yang baik terlihat dari adanya MK peminatan yang beragam yang terdiri dari berbagai MK yang bersifat ketrampilan. Pemilihan MK ini dapat memberi ketrampilan tambahan dan menjadi distingsi yang unggul bagi mahasiswa itu sendiri. Model pengembangan paket peminatan yang beragam seperti ini dapat menjadi suatu pilihan bagi PSPBA dalam mengembangkan kurikulum KKNI. Namun beban besar dimiliki PBA jika mengembangkan kurikulum dengan beragam paket seperti ini adalah harus menyediakan tenaga pengajar yang mencukupi. Sebagai alternatif PBA dapat engembangkan program peminatan secara terbatas, misalnya hanya dua peminatan.

Strukture kurikulum yang dapat diamati dari berbagai PBA yang disajikan terlihat bahwa, semua PBA menggunakan strukture model serial. Hal ini terjadi karena banyaknya MK yang disajikan pada PBA berbentuk MK pra syarat dan bertingkat dengan nama yang sama, yang kemudian diberi nomor seri masing-masing. Hal ini dapat dipahami karena kurikulum hasil bahasan PS bahasa dipenuhi dengan MK ketrampilan yang dibagi kepada empat ketrampilan yaitu ketrampilan mendengar, ketrampilan membaca, ketrampilan berbicara, dan ketrampilan menulis. Selain itu juga

terdapat MK ilmu pengetahuan bahasa yang bertingkat, namun berbeda dari dari aspek isi yaitu MK Nahwu, MK Sharaf dan MK Menterjemah. Semua ketrampilan dan ilmu tersebut merupakan pengetahuan dasar bagi mahasiswa bahasa, yang harus dikuasai. Terjadinya MK serial tersebut tidak dapat dihindari karena ilmu tersebut mempunyai kuantita keluasan dan kedalaman yang banyak. Inilah yang menyebabkan PS PBA tidak dapat menghindar dari menggunakan kurikulum dengan model serial.

IV. Problematikan Yang Dihadapi PS PBA Unggul dalam Pembahasan Kurikulum KKNi

Kendala adalah suatu faktor yang dapat menghambat, menghalangi, dan mencegah suatu usaha yang dilakukan untuuk mencapai sasaran yang diinginkan. Hampir dapat dipastikan bahwa, dalam suatu kegiatan yang dilakukan terdapat kendala atau halangan untuk mencapai suatu target diinginkan. Hal yang sama tentu terjadi dengan usaha penyusunan dan review kurikulum.

Secara umum terdapat beberapa kendala dalam penyusunan dan review kurikulum KKNi yang dilakukan di PS PBA yang menjadi subjek penelitian ini. Persoalan *pertama* adalah para dosen dan pimpinan PT memahami akan pentingnya kurikulum, dan terlanjur meyakini bahwa kurikulum yang sudah ada mempunyai kualitas yang cukup untuk pengembangan suatu bidang ilmu. Dalam situasi yang demikian muncul konsep kurikulum KKNi. Karena masih bersifat baru, konsep ini belum diketahui secara mendalam. Sehingga untuk mempelajarinya diadakan workshop kurikulum KKNi. Ironisnya kebanyakan dosen dan pimpinan tidak sempat menghadiri acara ini, karena mereka mempunyai banyak kesibukan. Hal seperti misalnya terjadi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Namun demikian kendala ini dapat diatasi dengan adanya komitmen semua pimpinan PT dan dosen untuk mereview kembali kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Adanya perhatian ini memberi peluang kepada pihak yang berkepentingan untuk menyediakan anggaran review kurikulum secara reguler. Dr. Nuruddin, MPd, Ketua PS PBA UNJ memandang perhatian pimpinan ini mejadi faktor positif untuk penyempurnaan kurikulum (Nuruddin, 2019). Dalam aspek ini, semua PS PBA yang menjadi subjek penelitian ini diuntungkan, karena berada di bawah PT yang mumpuni. UM Malang ketika mengadakan workshop kurikulum KKNi tidak perlu mengundang nara sumber luar, karena mereka memiliki ahli kurikulum KKNi secara internal. Di sisi lain bagi yang belum memiliki ahli internal dalam bidang kurikulum KKNi, PBA (subjek penelitian

ini) diuntungkan karena mempunyai dana yang mencukupi untuk mengadakan mengadakan workshop dengan mengundang nara sumber eksternal. Bandingkan dengan PT yang “miskin”, yang dananya masih belum mencukupi untuk kegiatan semisal ini.

Kendala *kedua*, adalah ketuntasan pembahasan CPL. Pembahasan CPL seharusnya melibatkan seluruh dosen yang mengampu MK pada PS, karena hanya merekalah yang mengerti tentang kedalaman dan keluasan Bahan Kajian yang dibutuhkan untuk penembangan MK. Dalam rapat pembahasan CPL di PBA UIN Ar-Raniry, dari 32 dosen yang diundang, hanya lima orang dosen yang memenuhi. Untuk itu PBA terpaksa mengadakan pertemuan berulang kali untuk mendapatkan CPL secara lengkap. Sebagai solusi dari masalah ini adalah perlu adanya peningkatan kesadaran dan motivasi kepada para dosen akan pentingnya CPL dalam pengembangan kurikulum. Dan diharapkan para dosen memiliki rasa butuh untuk dilibatkan dalam penyusunannya.

Namun demikian untuk mengembangkan CPL secara umum, PS PBA dapat terbantu oleh IMLA (*Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-Arabiyah*) Indonesia, yang telah mengembangkan templet umum CPL yang tersusun sebagai Standar Kurikulum PBA dan PBSA di Indonesia. Namun demikian hasil pembahasan IMLA masih terbatas dan bersifat umum. Sebagai pelengkap, semua PBA tentu mesti mengembangkan CPL yang berkarakteristik PBA universitas tertentu, sebagai distingsi suatu universitas. Untuk pengembangan CPL yang menjadi distingsi PS PBA dapat dipelajari dari pola pengembangan MK paket peminatan pada PS PBA Universitas Negeri Malang.

Kendala *ketiga*, yang dihadapi adalah perumusan kurikulum KKNI membutuhkan banyak tahapan dan menghabiskan banyak waktu dan energi. Sehubungan dengan itu pihak penyusun harus memiliki banyak kesempatan untuk menyelesaikan suatu kurikulum. Selain untuk membahas kurikulum tersebut juga berkenaan dengan banyak aturan tentang kurikulum KKNI, seperti Keppres, SNPT dan aturan lain-aturan (Nurhadi: 2017, 226). Kurikulum KKNI disusun dengan sinkronisasi antara berbagai aturan yang telah ada. Sehubungan itu, para pihak harus mengerti tentang semua aturan tersebut dan dapat diterapkan secara prinsipil dalam penyusunan kurikulum.

Persoalan lain (*keempat*) yang dihadapi sehubungan dengan kurikulum KKNI adalah persoalan pengembangan peminatan. Pengelola PBA dapat saja menggunakan

acuan-acuan yang dilihat dari studi banding tentang pengembangan paket peminatan, namun jika menerapkan dengan mencontoh kepada PS lain, mereka terkendala dengan kurangnya tenaga pengajar dalam bidang peminatan tertentu. Akibatnya adalah sulitnya mengembangkan ciri khas PS yang berbentuk peminatan. Untuk mendapatkan jalan keluar dari persoalan ini, maka PS harus merekrut dosen secara khusus, atau mengundang dosen luar biasa untuk mengampu MK peminatan yang diinginkan. Di sini bermakna PS mesti menyediakan dana yang lebih banyak.

V. Format dan Struktur Kurikulum KKNi

Dari uraian yang disajikan pada bagian terdahulu dari laporan penelitian ini dapat diamati bahwa semua kurikulum yang dipakai dalam penyusunan kurikulum KKNi di PS PBAunggul adalah struktur model serial. Mengikuti pendapat Yose Rizal, struktur kurikulum model serial adalah model kurikulum yang penyusunan mata kuliah dilakukan dari yang paling dasar sampai di semester akhir. Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat (Yose Rizal, 2015, 20). Nilai positif dari model serial ini adalah, jika mahasiswa mampu menyelesaikan serial MK secara baik, mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan akan mempunyai ilmu yang komprehensif.

Sebaliknya, persoalan yang dihadapi dalam penyusunan MK berdasarkan model serial adalah jika seorang mahasiswa gagal dalam MK serial sebelumnya, maka dia tidak dapat melanjutkan MK lanjutan, yang berakibat kepada pelambatan penyelesaian dalam MK tertentu. Selain itu mahasiswa juga tidak dapat mengambil MK lanjut semester di atasnya untuk MK serial tersebut, karena mereka belum menyelesaikan MK sebelumnya. Problematika lain juga dapat muncul dalam penggunaan model ini, adalah jika dosen antar MK berkelanjutan tidak saling berkomunikasi, seringkali kelanjutan perkuliahan tidak memberi kemampuan yang komprehensif kepada anak didik.

Pada PS PBA struktur kurikulum serial ini terlihat secara jelas dalam pengurutan MK yang (terkadang) diberi nomor, misalnya Muhadatsah I, Muhadatsah II, Muthalaah I, Muthalaah II, Nahwu I, Nahwu II, dst. Selain itu juga terlihat pada MK yang tidak bernomor tetapi harus berurutan, misalnya MK teori mengajar, harus didahulukan sebelum MK Praktek mengajar, MK Penelitian harus didahulukan sebelum masa penulisan skripsi, dan seterusnya.

Jika mengamati semua kurikulum yang dikembangkan pada PS PBA Unggul, terlihat bahwa struktur umum kurikulum menyerupai atau sangat mendekati struktur dalam tabel berikut ini yang merupakan struktur kurikulum yang dikembangkan oleh IMLA Pusat :

Tabel X
Struktur Kurikulum IMLA

Basis ilmu	Bidang dan Sub	PRODI PBA		PRODI BSA	
U T A M A	1. Kompetensi Bahasa Arab (68-88 sks) (47%-61%)				
		a. Kebahasaan	16-20	a. Kebahasaan	16-20
		b. Kesastraan	10	b. Kesastraan	10
		c. Kebudayaan	6	c. Kebudayaan	6
		d. Kemahiran berbahasa	36-52	d. Kemahiran Berbahasa	36-52
	2. Kompetensi Profesional (34-42 sks) (24%-29%)				
		a. Dasar-dasar keprofesian (kependidikan)	10	a. Dasar-dasar analisis bahasa, sastra, budaya	10
		b. Kepegajaran	16-18	c. Analisis bahasa, sastra, budaya.	16-18
		d. Penelitian dan skripsi	8-14	b. Penelitian dan skripsi	8-14
	P E N D U K U N G	3. Nasionalisme (8 sks) ** (6%)			
		Pend. Agama	2	Pend. Agama	2
		Pancasila	2	Pancasila	2
		PKn	2	PKn	2
		Bahasa Indonesia	2	Bahasa Indonesia	2
4. Keilmuan (4 sks) ** (3%)					
	Filsafat Ilmu	2	Filsafat Ilmu	2	
	Bahasa Inggris	2	Bahasa Inggris	2	
P E N C I R I	5. Profesi tambahan (8-12 sks) (6%-8%) (mahasiswa memilih salah satu paket)				
		a. Kaligrafi	8-12	a. Kaligrafi	8-12
		b. Penerjemahan	8-12	b. Penerjemahan	8-12
		c. TI Bahasa Arab	8-12	c. TI Bahasa Arab	8-12
		d. BA untuk anak	8-12	d. BA untuk anak	8-12
		e. Paket lain	8-12	e. Paket lain	8-12

Struktur kurikulum dengan sajian MK dan jumlah sks seperti ini dijadikan sebagai standar pedoman pengembangan kurikulum KKNI di PS PBA. Struktur ini dianggap sudah sangat baik dan jika diterapkan secara sempurna akan mampu

mengantarkan alumni kepada target CPL yang diinginkan. Adapun struktur kurikulum per semester dari subjek penelitian dapat diamati dalam lampiran penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk MK yang harus diselesaikan mahasiswa pada setiap semester.

Namunpun demikian, jika diamati dari aspek sks yang diberlakukan, PS PBA unggulan yang menjadi subjek penelitian ini, mempunyai variasi. Pada PS PBA UIN Ar-Raniry, mahasiswa harus menyelesaikan sebanyak 148 sks, UIN Syarif Hidayatullah sebanyak 154 sks, UIN Malang sebanyak 148 sks, UNJ sebanyak 148 sks, dan UM sebanyak 146 sks. Dari dapat disimak bahwa, secara umum jumlah sks yang harus diselesaikan mahasiswa dalam menyelesaikan program S1 di PS PBA adalah berkisar antara 146 - 154 sks. Jumlah ini dianggap ideal dan masih dalam jangkauan kemampuan dan waktu yang disediakan. Jika dilihat dari aspek pengelolaan, jumlah ini masih dapat dikelola secara baik.

BAB V PENUTUP

Dari penjelasan panjang yang diuraikan dalam laporan penelitian ini, kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan, seperti berikut :

1. Aturan pengembangan kurikulum KKNI telah menetapkan tahapan-tahapan penyusunan kurikulum, yaitu (1). Penetapan Profil Lulusan. (2). Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (3). Penetapan Bahan Kajian. (4). Penentuan Mata Kuliah. (5). Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah. (6). Penyusunan Struktur Kurikulum. (7). Proses Pembelajaran. (8). Penilaian, dan (9). Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester. Secara umum PS PBA yang menjadi subjek penelitian ini mengembangkan kurikulum dengan mengikuti langkah-langkah tersebut. Namun demikian dalam penetapan MK tidak dilakukan secara mendalam dengan mengembangkan CPL dan BK secara bebas, tetapi lebih kepada menggunakan CPL yang sudah ada dalam (Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014, serta menyesuaikan CPL dan BK tersebut dengan MK yang sudah ada. Pengembangan CPL yang mandiri hanya dilakukan terhadap MK peminatan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal PS tersebut.
2. Dalam pengembangan kurikulum KKNI, PS PBA menemukan beberapa kendala yaitu : *pertama*, karena masih bersifat baru, konsep ini belum diketahui secara mendalam oleh dosen dan pengelola PS PBA, sehingga perlu diadakan workshop kurikulum KKNI. *Kedua*, Pembahasan CPL seharusnya melibatkan seluruh dosen yang mengampu MK pada PS, karena hanya merekalah yang mengerti tentang kedalaman dan keluasan Bahan Kajian yang dibutuhkan untuk penembangan MK, namun rapat pembahasan CPL terkendala karena dengan banyaknya kesibukan, sebagian besar dosen tidak memenuhi undangan, sehingga pengembangan CPL secara mandiri sulit dilakukan. *Ketiga*, perumusan kurikulum KKNI membutuhkan banyak tahapan dan menghabiskan banyak waktu dan energi. Sehubungan dengan itu pihak penyusun harus memiliki banyak

kesempatan untuk menyelesaikan pembahasan kurikulum. Selain itu untuk membahas kurikulum tersebut juga berkenaan dengan banyak aturan tentang kurikulum KKNI, seperti Keppres, SNPT dan aturan lainnya. *Keempat*, dalam pengembangan peminatan, PS PBA terkendala dengan kurangnya sumber daya manusia di PS, sehingga sulit untuk mengembangkan peminatan seperti yang dibutuhkan.

3. Struktur kurikulum yang dikembangkan PS PBA unggul adalah struktur kurikulum model serial, di mana MK menurut model ini, penyusunan mata kuliah dilakukan dari yang paling dasar sampai di semester akhir. Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat. Struktur kurikulum serial ini terlihat secara jelas dalam pengurutan MK yang (terkadang) diberi nomor, misalnya Muhadatsah I, Muhadatsah II, Muthalaah I, Muthalaah II, Nahwu I, Nahwu II, dst. Nilai positif dari model serial ini adalah, jika mahasiswa mampu menyelesaikan serial MK secara baik, mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan akan mempunyai ilmu yang komprehensif.

Daftar Pustaka/Referensi

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Rosdakarya, 2005).
- Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap, dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Absolut, 2004), cet. II. Ahmad, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).
- Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cet. VIII.
- Ali Akbar Jono. Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu, *Jurnal Manhaj*, Vol. 4, Nomor 1, Januari - April 2016
- Anna Zakiyah Derajat: Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi, <https://geotimes.co.id/opini/penerapan-kurikulum-berbasis-kkni-di-perguruan-tinggi/>
- Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Beberapa Pokok Pikiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. II.
- Casmini: Evaluasi Dan Peninjauan Kurikulum Bki Berbasis KKNI, dimuat dalam *Jurnal Hisbah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014.
- Donald E. Orlosky & B. Othanel Slith, *Curriculum development, Issues and Insights*, (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1978), ed. VIII.
- G. Wesley Soward & Mary-Margaret Scobey, *The Changing Curriculum and the Elementary Teacher*, (California, Wadsworth Publishing Company, 1968), ed. II.
- Ibnu Mandhūr, *Lisānul'Arab*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2003), juz VII.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet. XXIV, 2000).
- John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terj. Ahmad Fawaid, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, Cet. ke-18
- Muljanto Sumardi, *Pengajaran Bahasa Asing, Sebuah Tinjauan Dari Segi Metodologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet. II.
- Nana Syaodih Sukmadita, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cet VI.
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Omar Muhammad al-Toumy al-Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), cet. I.
- Peraturan Presiden RI, no. 8 tahun 2012, pasal 1 ayat 1
- Philip Babcock Gove (Ed.), *Webster's Third New International Dictionary*, (Massachusetts: G & C Merriam Company, Publishers Springfield, 1966.
- Philip W. Jackson, *Conseptions of Curriculum and Curriculum Specialists*, dalam *Handbook of Research on Curriculum*, (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1992).
- Ronald C. Doll, *Curriculum Improvement, Decision Making and Process*, (Boston: Allyn & Bacon Inc, 1977), hal. 19.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Garis-garis Besar Haluan Negara*, Ketetapan MPR. Nomor II/MPR/1983, hal 91.

- S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta, Bumi aksara, 2006), cet. VII, ed II.
- S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. IV.
- Standar Nasional Pendidikan**, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005, (Jakarta: Lekdis, 2005).
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi** (SN-DIKTI) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Syarifuddin. Dkk. *Model Penerapan Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) Sebagai Penguatan Mutu Program Studi Pariwisata Dan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo*, Gorontalo, Fak. Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo, 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia no. 12, tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi, Bab I, pasal 5.
- Wahhab, Muhib Abdul, *Jurnal Arabiyat, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, 3 (1), 2016
- Yahya Handāmi dan Jābir Abdul Hamīd Jābir, *Al-Manhaj, Asāsuhā, Takhtītuhā, Taqwīmuhā*, (Kairo: Dār al-Nahdhah al-Arabīah, 1987), cet. III.

Lampiran 1.

Struktur Kurikulum PBA UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Semester I		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	Bahasa Inggris	2
3	Matematika Dasar	2
4	Bahasa Arab	2
5	Ulumul Quran dan Hadits	2
6	Istima' I	2
7	Muhadatsah I	2
8	Nahwu I	2
9	Sharaf I	2
10	Muthalaah I	2
Total		20

Semester II		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Bahasa Indonesia	2
2	Fikh/Ushul Fikih	2
3	Filsafat Umum	2
4	Ilmu Pendidikan	2
5	Istima' II	2
6	Muhadatsah II	2
7	Nahwu II	2
8	Sharaf II	2
9	Muthalaah II	2
10	Insyak I	2
11	Funun Khat	2
Total		22

Semester III		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Ilmu Kalam	MK Opsional Wajib pilih 2 sks
	Ilmu Akhlak	
	Sejarah Peradaban Islam	
2	Studi Syariat Islam	2
3	Psikologi Pendidikan	2
4	Manajemen Pendidikan	2
5	Filsafat Ilmu	2
6	Metode Pembelajaran BA I	2
7	Multi Media PBA	3
8	Muhadatsah III	2
9	Nahwu III	2
10	Sharaf III	2
11	Muthalaah III	2
12	Insyak II	2
Total		24

Semester IV		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	MSI	2
2	Statistik Pendidikan	2
3	Filsafat Pendidikan	2
4	Metode Pembelajaran BA II	2
5	Pengemb. Kurikulum Bahasa Arab	2
6	Muhadatsah IV	2
7	Nahwu IV	2
8	Muthalaah IV	2
9	Insyak III	2
10	Balaghah I	2
11	Bahasa Arab Untuk Media Massa	Opsional, wajib pilih 2 sks
	Bahasa Arab Haji dan Umrah	
12	Qawaid Tarjamah	2
Total		24

Semester V		
No.	Mata Kuliah	Bobot
1	Metode Penelitian Pendidikan	3
2	Sosiologi Pendidikan	2
3	Evaluasi pemb. Bahasa Arab	3
4	Insyak IV	2
5	Balaghah II	2
6	Tarjamah Arab - Indonesia	Opsional, wajib pilih 2 sks
	Manajemen Kursus	
7	Pemb. Bahan ajar Bahasa Arab	2
8	Magang I	1
9	Perencanaan Pemb. BA	3
10	Multi Media Pemb. BA	1
11	Ilmu al-Lughah al-Nafs	2
Total		23

Semester VI		
No.	Mata Kuliah	Bobot
1	Magang II	1
2	Micro teaching	2
3	Metode Penelt Bahasa Arab	2
4	Ilmu Lughah	2
5	Balaghah III	2
6	Tarikh Adab wa al-Nushus	2
7	Tarjamah Arab - Indonesia	Opsional, wajib pilih 2 sks
	Edupreneur Media Elektronik PBA	
Total		13

Semester VII		
No.	Mata Kuliah	Bobot
1	Fiqh Lughah	2
2	Balaghat al-Quran	2
3	Pemanfaatan Tekn. Pembelajaran	Opsional, wajib pilih 2 sks
	Edupreneur Media Cetak PBA	
Total		6

Semester VII		
No.	Mata Kuliah	Bobot
1	PPKPM	8
2	Skripsi	4
Total		12

Lampiran 2

Struktur Kurikulum PBA UIN Syarif Hidayatullah

Semester I		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Studi Islam	4
2	Pancasila	2
3	Bahasa Indonesia	3
4	Bahasa Inggris	3
5	Praktikum Qiraah	2
6	Muhadatsah 1	2
7	Sharaf 1	2
8	Nahwu 1	2
9	Qiroah 1	2
10	Istima I	2
Total		20

Semester II		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	PKN	2
2	Ilmu Pendidikan Islam	2
3	Pendidikan Akhlak	3
4	Praktikum Ibadah	2
5	Ilm Ashwat	2
6	Muhadatsah 2	2
7	Istima' 2	2
8	Nahwu 2	2
9	Qira'ah 2	2
10	Sharaf 2	2
Total		21

Semester III		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Muhadatsah 3	2
2	Balaghah 1	2
3	Insya' 1	2
4	Nahwu 3	2
5	Ilm Lughah Al-Am	2
6	Media dan Tekn. Pembelajaran BA	3
7	Qiroah 3	2
8	Filsafat dan Ilmu Pendidikan	2
9	Tarjamah 1	2
10	Khat Arabi	2
11	Psikologi Pendidikan	3
Total		24

Semester IV		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Balaghah 2	2
2	Evaluasi Pembj. BA 1	2
3	Tarjamah 2	2
4	Insya' 2	2
5	Metode Khusus Pembj. BA 1	2
6	Ilmu al-Lughah an Nafsi	2
7	Qira'ah 4	2
8	Nahwu (4)	2
9	Al Lahajat al-Arabiyyah	2
10	Kurikulum dan Pembelajaran	2
11	Tadribat Lughawiyah 1	2
Total		22

Semester V		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Metode Khusus Pembelajaran BA 2	2
2	Insya' 3	2
3	Balaghah 3	2
4	Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 2	2
5	Fiqh Lughah 1	2
6	Telaah Kurikulum dan Buku Teks BA1	2
7	Metode Penelitian Kependidikan	3
8	Perencanaan Pembelajaran BA	3
9	Tadribat Lughawiyah 2	2
10	Ilmu Lughah at Tatbiqi	2
11	Metode Khusus Pembelajaran BA 2	2
Total		24

Semester VI		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Fiqh Lughah 2	2
2	Tarikh al-'Ulum al-Arabiyyah	2
3	Penelt. Tindakan Kelas (PTK)	2
4	Statistika Pendidikan	2
5	Kurikl. dan Buku Teks BA2	2
6	Metode Penelt. Bahasa	3
7	Strategi Pembelj. BA	3
8	Ilmu al-Dalalah wa al-Ma'ajim	2
9	Kepramukaan	2
10	Fiqh Lughah 2	2
11	Tarikh al-'Ulum al-Arabiyyah	2
Total		24

Semester VII		
---------------------	--	--

Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Pengajaran Mikro	3
2	Nadwah al-Bahts	2
Total		5

Semester VIII		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Praktik Kependidikan	4
2	Skripsi	6
Total		10

Lampiran 3

Struktur Kurikulum PBA UNJ

Semester I		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Pancasila	2
2	Bahasa Indonesia	2
3	Landasan Ilmu Pendidikan	4
4	Khat	2
5	Imla	2
6	Istima' I	2
7	Kalam I	3
8	Qiraah I	3
9	Estetika	2
Total		22

Semester II		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Agama	2
2	Kewarga-negaraan	2
3	Bahasa Inggris	2
4	Psikologi Perkembangan	2
5	Nahwu I	3
6	Istima' II	2
7	Kalam II	3
8	Qiraah II	3
9	Filsafat Ilmu	2
Total		21

Semester III		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Teori Belajar dan Pembj.	4
2	Sharaf I	3
3	Kalam III	2
4	Qiraah III	2
5	Al-Quran	2
6	Komputer Arab	2
7	Perenc. Peblj. Bahasa Arab	2
Total		17

Semester IV		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	IAD	2
2	Pengemb. Profesi Pembelajaran	2
3	Ilmu Lughah al-Am	2
4	Nahwu II	3
5	Kalam IV	2
6	Qiraah IV	2
7	Kitabah I	3
8	Praktek Mengajar	2
9	Media Pembj. Bahasa Arab	2
10	Evaluasi Pembj. Bahasa Arab	2
Total		22

Semester V		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Ilmu Aswat	2
2	Sharaf II	2
3	Kitabah II	3
4	Teori Tarjamah	2
5	Balaghah I	2
6	Sosiolinguistik	MKO
7	Psikolinguistik	
8	Statistik	2
9	Penelitian	2
10	Ilmu Dakwah	2
11	Metd. Pembj. Bahasa Arab	3
Total		22

Semester VI		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Nahwu III	2
2	Kitabah III	2
3	Tarjamah I	2
4	Balaghah	2
5	Teori Sastra	2
6	Ilmu Dalalah	2
7	Anakon Anakes	2
8	Taujih Risalah	2
9	Pemb. Kompetensi Mengajar	2
Total		18

Semester VII		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Istimak III	2
2	Tarjamah II	2
3	Tsaqafah Islamiyah	2
4	Tarikh Adab	2
5	Nusush Adab	2
6	Fikih	2
7	Nadwah Ilmiah	2
Total		14

Semester VIII		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Nadwah Ilmiah	2
2	Skripsi	6
3	KKN	2
Total		10

Lampiran 4

Struktur Kurikulum PBA UM

Semester I		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Istima' Mukatstsaf I	2
2	Kalam Mukatstsaf I	2
3	Tathbiq Mufrodat	2
4	Qira'ah Mukatstsafah I	2
5	Kitabah Mukatstsafah I	2
6	Tarkib Mukatstsaf I	2
7	Tajwid Tilawah Wa Kitabatil Qur'an	2
8	Pendidikan Agama Islam	2
9	PKN	2
10	Perkembangan Peserta Didik	3
Total		21

Semester II		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Ilmu Lughah	2
2	Istima' Mukatstsaf II	2
3	Kalam Mukatstsaf II	2
4	Qira'ah Mukatstsafah II	2
5	Kitabah Mukatstsafah II	2
6	Tarkib Mukatstsaf II	2
7	Khath Imlak	2
8	Amtsal Arabiyah	2
9	Pendidikan Pancasila	2
10	Bahasa Indonesia Keilmuan	2
11	Pengantar Pendidikan	3
Total		23

Semester III		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Ilmu Ashwat	2
2	Ilmu Dilalah	2
3	Tathbiq Sharfi I	2
4	Tathbiq Nahwi I	2
5	Tarikh Adab	2
6	Tarikh Hadharah	2
7	Istima' I	2
8	Kalam I	2
9	Qira'ah I	2
10	Kitabah I	2
11	Pengantar Filsafat Ilmu	2
Total		22

Semester IV		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Tathbiq Sharfi II	2
2	Tathbiq Nahwi II	2
3	Balaghah I	2
4	Jughrafiya	2
5	Tafahum Tsaqafi	2
6	Istima' II	2
7	Kalam II	2
8	Qira'ah II	2
9	Kitabah II	2
10	Belajar dan Pembelajaran	4
Total		22

Semester V		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Qawa'id Syamilah	2
2	Balaghah II	2
3	Khatabah	2
4	Qira'ah Al-Nushush Al-Turatsiyyah	2
5	Kitabah Maqalah	2
6	Tarjamah	2
7	Thariqah Tadris	2
8	Wasail Tadris	2
9	Taqwim	2
10	Manahij wa Kutub Madrasiyah	3
Total		21

Semester VI		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Dirasah Natsriyah	2
2	Dirasah Syi'riyah	2
3	Qira'ah Al-Nushush Al-'Ashriyyah	2
4	Ikhtibar Syamil	3
5	Tadris Mushaghar	2
6	Thariqah Bahts	3
7	Sebagai tambahan MK pada semester VI, mahasiswa diwajibkan mengambil 8 sks MK pilihan.	8
Total		22

Semester VII		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Al-Bahts al-Ilmi (skripsi)**	6
2	Kajian dan Praktik Lapangan***	4
3	Selain ini, mahasiswa smt VII diwajibkan mengambil MK pilihan sebanyak 4 sks, sesuai bidang peminatan.	4
Total		14

Semester VIII		
Nomor	Mata Kuliah	Bobot
1	Al-Bahts al-Ilmi (skripsi)*	6
2	Kajian dan Praktik Lapangan**	4
3	Kuliah Kerja Nyata** *	4
Total		14



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019

Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Ismail Muhammad
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	1967110411996031001
5.	NIDN	201104196701
6.	NIPN	191160000024242
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Geurugok/11 April 1967
8.	Email	Ismara114@gmail.com
9.	Nomor HP	08116811467
10.	Alamat kantor	Darussalam - Banda Aceh
11.	Nomor Telepon Kantor	-
12.	Bidang Ilmu	Bahasa Arab
13.	Program Studi	Pendidikan Bahasa Arab
14.	Fakultas	Tarbiyah dan Keguruan

Riwayat Pendidikan

No.	Strata	Perguruan Tinggi	Program Studi	Tamat tahun
1.	S1	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tarbiyah Bahasa Arab	1991
2.		IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pembibitan Calon Dosen IAIN	1995
3.		UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pembibitan Calon Dosen IAIN Tahap II	1996
4.	S2	IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Bahasa dan Sastra Arab	2000
5.	S3	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Bahasa dan SasArab	2008

Pengalaman Penelitian Dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Kurikulum Kkni, Dan Pola Pengembangannya Pada Program S1 Pendidikan Bahasa Arab Di Indonesia (Penelitian Pada Program Studi S1 Bahasa Arab Yang Berakreditasi Unggul)	DIPA
2.	2020	Pendidikan Islam Informal Dalam Lingkungan Keluarga Islam di Bali	DIPA

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Pengabdian Masyarakat	Sumber Dana
1.	2015 - 2020	Pengurus Komplek Perumahan UIN, Desa Cot yang - Kuta Baro	Mandiri
2.	2016 - 2020	Anggota Komite SMAN 4, Kota Madya Banda Aceh	Mandiri

Publikasi Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Nama Jurnal	Volume Sumber Dana
1.	Asal Usul, Klasifikasi dan Pola Pengembangan Bahasa Arab	Al-Arabiyah	Vol. 1, No. 1, September 2012
2.	Posisi Bahasa Arab Dalam Klasifikasi Ilmu Bahasa Arab	Futura	Vol. XI, No. 1, Januari 2012
3.	Memahami Kurikulum	Intelektualita	Vol II, No. 2, Juni 2015
4.	Kosep Tarjamah, Takwil, Tafsir dan Hermenetika	Al - Muashirah	Vol. 13, No. 2, Juli 2016
5.	Analisis Isi Kitab al-Quran al-Karim Wa Bihamisihi Turjuman al-Mustafid	Al- Muashirah	Vol. 16, No. 1, Januari 2019